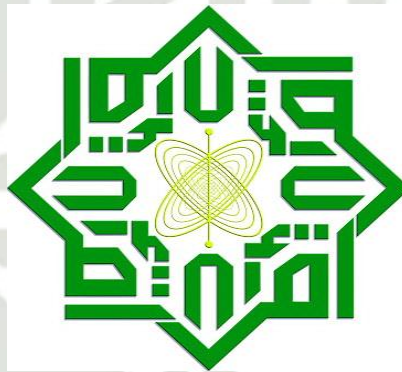


**“WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN BAGI GADIS DAN
JANDA (*BALIGH*) MENURUT PEMIKIRAN IMAM ABU
HANIFAH”**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga
(Akhwa Syakhsiyyah)**



OLEH:

HARLIZA
NIM: 21890225359

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H. /2019 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

Harliza
21890225359
M.H. (Magister Hukum)
Wali Mujbir dalam Perkawinan bagi Gadis dan Janda
(Baligh) menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah

Dr. H. Muslim Afandi, M. Pd
Penguji I / Ketua



Dr. Afiq Budiawan, M.H.I
Penguji II /Sekretaris

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
Penguji III



Dr. Zulkayandri, M. Ag
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan

23 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul *“Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah”*, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Harliza
NIM : 21890225359
Prodi : Hukum Keluarga
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 23 Desember 2019.

Penguji I,

Dr. H. Zulkavandri, M.Ag
NIP. 197101051995031002

Tgl. 30 Desember 2019

Penguji II,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP. 195402121981031007

Tgl. 30 Desember 2019

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan 'dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul " *Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah*" yang ditulis oleh:

Nama : Harliza
 NIM : 21890225359
 Prodi : Hukum Keluarga
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 23 Desember 2019.

Pembimbing I

Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA
 NIP. 196005151991021001

Tgl: 30 Desember 2019

Pembimbing II

Dr. Hajar Hasan, M.Ag
 NIP. 195807121986031005

Tgl: 30 Desember 2019

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul ***“Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah.”*** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Harliza
 NIM : 21890225359
 Prodi : Hukum Keluarga
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 30 Desember 2019

Pembimbing I,

Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA
 NIP. 196005151991021001

Tanggal: 30 Desember 2019

Pembimbing II,

Dr. Hajar Hasan, M.Ag
 NIP. 195807121986031005

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. ZIKRI DARUSSAMIN, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Harliza

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

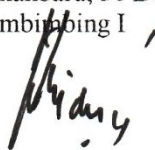
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis Saudara:

Nama : Harliza
NIM : 21890225359
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : ***"Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah."***

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 30 Desember 2019
Pembimbing I



Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA
NIP. 196005151991021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. HAJAR HASAN, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Harliza

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis Saudara:

Nama : Harliza
NIM : 21890225359
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : ***"Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (Baligh) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah."***

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 30 Desember 2019
Pembimbing II

Dr. Hajar Hasan, MA
NIP. 195807121986031005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harliza
 NIM : 21890225359
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Lajau, 14 Juli 1986
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: “WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN BAGI GADIS DAN JANDA (*BALIGH*) MENURUT PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 November 2019

UIN SUSKA RIAU

Harliza
 NIM. 21890225359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis persembahkan Kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta Inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan Fiddunya wal akhirat.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara Individu maupun kelompok, lembaga atau Instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Pascasarjana Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai penulis dapat menyelesaikan Tesis. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk meraih derajat akademik Magister di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan karena prestasi dan kredibilitasnya dalam mendidik anak bangsa.
2. Bapak **Prof. Dr. Afrizal M, MA** sebagai Direktur Program Pascasarjana, **Drs. H. Iskandar Arnel, MA, Ph.D** selaku wakil Direktur Program Pascasarjana, dan **Dr. Junaidi Lubis, S.Ag, M.Ag** selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan dan inspirasi berharga baik selama masa studi maupun dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Hajar Hasan, M. Ag** selaku pembimbing II, yang kearifan dan kesabaran, tidak saja mencurahkan waktu tapi juga memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
4. Segenap guru besar dan dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan do'a beliau, penulis dapat memperoleh prestasi akademik tertinggi dan mampu menyelesaikan Tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Suami tercinta Agusman Saputra, S. HI yang memberikan dukungan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam proses penulisan tesis ini.
7. Saudara-saudaraku yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Pihak pelaksana administrasi dan Akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan dedikasi tinggi telah bekerjasama secara baik dalam melayani keperluan penyelesaian studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, penulis senantiasa memanjatkan do'a semoga segala perhatian dan juga yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 November 2019

Penulis

Harliza

NIM: 21890225359

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Halaman Judul | |
| Nota Dinas | |
| Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi | |
| Surat Pernyataan | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Pedoman Transliterasi | v |
| Abstrak | vii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Defenisi Operasional | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Landasan Teori | 11 |
| H. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 13 |
| I. Metode Penelitian | 16 |
| J. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR SERTA KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH | |
| A. Wali Nikah Dalam Perkawinan | 19 |
| 1. Pengertian Wali | 19 |
| 2. Syarat-Syarat Wali Nikah | 21 |
| 3. Dasar Hukum Adanya Wali | 25 |
| 4. Wali Nikah Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 27 |
| 5. Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)..... | 29 |
| 6. Peran Wali Dalam Perkawinan | 31 |
| 7. Macam-Macam Wali | 36 |
| B. Konsep Wali <i>Mujbir</i> | 44 |
| 1. <i>Madzhab</i> Hanafi | 45 |
| 2. <i>Madzhab</i> Syafi'i | 50 |
| 3. <i>Madzhab</i> Hanbali | 56 |
| 4. <i>Madzhab</i> Maliki | 58 |
| 5. Konsep Yusuf Qardhawi | 63 |
| 6. Konsep Husen Muhammad | 65 |
| 7. Syarat-Syarat Wali <i>Mujbir</i> dan <i>Ghairu Mujbir</i> | 67 |
| 8. Orang Yang Berhak Menjadi Wali <i>Mujbir</i> | 69 |
| C. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> | 71 |
| D. Kemaslahatan Sebagai Tujuan <i>Syari'at</i> Islam | 76 |
| E. Tingkatan <i>Maslahah</i> | 78 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WALI MUJBIR

| | |
|--|-----|
| A. Biografi Abu Hanifah | 94 |
| 1. Pengalaman Abu Hanifah Dalam Belajar | 99 |
| 2. Imam Abu Hanifah dibidang Politik, Sosial dan Kebudayaan..... | 100 |
| 3. Pemikiran Fiqih Imam Abu Hanifah..... | 103 |
| 4. Karya-Karya Imam Abu Hanifah | 105 |
| 5. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Abu Hanifah | 109 |
| B. Pandangan Abu Hanifah Tentang Wali <i>Mujbir</i> Dalam Perkawinan | 119 |

BAB IV: METODE ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK WAJIBNYA WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN BAGI GADIS DAN JANDA (BALIGH) SERTA TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH

| | |
|---|-----|
| A. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Abu Hanifah tentang penetapan tidak wajibnya wali <i>mujbir</i> dalam perkawinan bagi gadis dan janda (<i>Baligh</i>) | 126 |
| B. Tinjauan <i>maqashid al-Syari'ah</i> tentang tidak wajibnya wali <i>mujbir</i> dalam perkawinan bagi gadis dan janda (<i>Baligh</i>)..... | 137 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 158 |
| B. Saran-Saran | 160 |

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988. No. 58/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*). INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ا | A | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | Sh | ي | Y |
| ض | Dl | | |

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dhomeh* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قال menjadi qāla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbah diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khairun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

D. Kata Sambung dan Lafazh al-Jalalah

Kata sambung berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh Jalālāh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imam al-Bukhari mengatakan....
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- Masyā' Allah kanā wā mā lam yasya 'lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Harliza: (2019): Wali *Mujbir* dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (*Baligh*) Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah”

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penulisan Tesis ini yang menjadi permasalahan adalah wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*) menurut pemikiran Imam Abu Hanifah. yang menjadi rumusan masalahnya adalah, bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dalam penetapan tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*) dan bagaimana tinjauan *maqashid al-Syari'ah* tentang tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dalam penetapan tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*) dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid al-Syari'ah* tentang tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*). Adapun kegunaan dari penelitian ini selain dari syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam juga sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi Penulis tekuni dan sebagai tambahan referensi pustaka UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian literatur atau penelitian pustaka (*library reseach*). Artinya penelitian ini didasarkan pada yang tertulis berasal dari kitab, buku jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab klasik dan modern serta buku-buku yang berhubungan dengan konsep wali *mujbir*.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab karya Imam Abu Hanifah dan muridnya dalam kitabnya *al-Mabsûth*, *as-Shana'i* dan *Fath al-Qadir*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi (*content analysis*) agar diperoleh pemahaman yang akurat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang penetapan hukum tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*) adalah menggunakan dalil al-Qur'an dengan pendekatan *bil-ra'yi* atau analogi kemudian sunnah dengan pendekatan *bil-ma'tsur* yaitu penjelasan hadis dengan hadis, selanjutnya tinjauan *maqashid al-Syari'ah* terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang wali *mujbir* atau hak ijbarnya seorang wali hanya diperuntukkan bagi perempuan yang belum *baligh*, tidak waras dan mempunyai keterbelakangan mental (*idiot*) karena perbuatan mereka belum cakap hukum, maka dalam hal ini kedudukan wali digolongkan kepada *masalah dharuriyah* wajib ada demi menjaga kemaslahatan orang yang berada dibawah perwaliannya. Namun jika perempuan tersebut sudah *baligh* kedudukan wali hanya sebagai penyempurna atau disebut dengan *masalah hajiyyat* akan tetapi harus ada terlebih dahulu persetujuan dari seorang wali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Harliza (2019): *Mujbir Guardians in Marriage For Girls And Widows (Baligh) According To Abu Hanifah*

In the writing of this thesis the problem is the guardian of *mujbir* in marriage for girls and widows (*baligh*) according to the thought of Imam Abu Hanifa. the formulation of the problem is, how is the method of *istinbath* of Imam Abu Hanifah's law in the determination of the non-obligatory guardian of *mujbir* in marriage for girls and widows (*baligh*) and how is the review of *maqashid al-Shari'ah* about the non-mandatory guardianship of marriages for girls and widows (*baligh*)

The purpose of this study is to find out how the method of *istinbath* of Imam Abu Hanifah's law in determining the non-mandatory guardianship of *mujbir* in marriage for girls and widows (*baligh*) and to find out how to review *maqashid al-Shari'ah* about the non-obligatory guardian of *mujbir* in marriage for girls and widow (*baligh*). The usefulness of this research apart from the requirements to obtain a Master of Islamic Law also as a means to develop knowledge in accordance with the study program of the Writer diligently and as an additional reference library of the ISLAMIC STATE UNIVERSITY SULTAN SYARIF KASIM RIAU and as a contribution of thought for those in need.

The research method that I use is literature research or library research (*library research*). This means that this research is based on what is written from books, journal books and other written data sources that are useful and support this research. This data search is performed on classical and modern books and books related to the concept of wali *mujbir*.

The primary data source in this study is the book by Imam Abu Hanifa and his students in his book *al-Mabsûth*, *as-Shana'i* and *Fath al-Qadir*. The approach used in this research is the content analysis approach in order to obtain an accurate understanding.

This study concludes that the method of *istinbath* used by Imam Abu Hanifah regarding the determination of the law does not require the guardian of *mujbir* in marriage for girls and widows (*baligh*) is to use the proposition of the Koran with the approach of *bil-ra'yi* or analogy then sunnah with the *bil* approach -*ma'tsur* is an explanation of the hadith with a hadith, then the *maqashid al-Shari'ah* review of the opinion of Imam Abu Hanifah about the wali *mujbir* or *ijbar* rights of a wali is only for women who are not *baligh*, insane and have mental retardation (idiots) because of deeds they are not yet capable of law, so in this case the position of guardian is classified as *masalah dharuriyah* must exist in order to protect the benefit of people who are under his guardianship. But if the woman has reached the position of guardian only as a perfection or is called *masalah hajiyyat* but there must be prior approval from a guardian.

ملخص

هارليزا، (2019) عنوان الرسالة العلمية "الولي المجبر في الزواج من الفتيات والأرامل عند الإمام أبي حنيفة" قسم الأحوال الشخصية بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.

في هذا البحث , في كتابة هذه الرسالة التي هي المشكلة هي مجابر في الزواج من الفتاة والأرملة (بالبحر) حسب فكر الإمام أبو حنيفة. المشكلة هي كيف أن مثل هذا الأسلوب من الإمام أبو حنيفة في تحديد ليس وجه والي مجابر في الزواج للفتيات والأرامل (بالبحر) وكيفية مراجعة المقاصد الشريعة عن عدم وجه والي مجابر في الزواج للفتيات والأرامل (بالبحر).

وهدف هذا البحث. كيف أن مثل هذا الأسلوب من الإمام أبو حنيفة في تحديد ليس وجه والي مجابر في الزواج للفتيات والأرامل (بالبحر) وكيفية مراجعة المقاصد الشريعة عن عدم وجه والي مجابر في الزواج للفتيات والأرامل (بالبحر) وفائدة هذا البحث، منغير على أن هذا البحث من اشتراط الحصول على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية وهو وسيلة لتطوير المعرفة وفقاً لبرنامج دراسة الباحث بالإضافة إلى زيادة المراجع في مكتبة جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو وأراء للمحتاجين إليه.

طريقة البحث التي استخدمتها الباحثة هي بحث مكتبي. بمعنى أن هذا البحث يعتمد على النتائج المستخلصة من الكتب والمجلات ومصادر البيانات المكتوبة الأخرى المفيدة والداعمة لهذا البحث. تم البحث عن هذه البيانات على الكتب الكلاسيكية والحديثة وكذلك الكتب المتعلقة بمفهوم الولي المجبر. المصدر الرئيسي لهذا البحث هو كتاب الإمام أبو حنيفة وطلابه في كتبهم من المبسوط والصناعات وفتح القدير. المدخل المستخدم في هذا البحث هو مدخل تحليل المضمون لاكتساب فهم دقيق.

تخلص هذا البحث إلى أن حجة الإمام أبي حنيفة من هذا البحث أن منهاج الاستنباط الذي استخدمه الامام أبو حنيفة في جواز نكاح المرأة الرشيدة والايام بغير اذن الولي الاستدلال بتفسير القرآن بالرأى أو القياس ثم الاستدلال بالحديث بالمأثور وهو تفسير الحديث بالحديث والاجبار منحصر في الفتاوى الصغيرة والمجنونة لعدم أهليتها ومشاركة ولي المجبر في نكاحها حفاظاً على الضرورية الخمسة التي يجب مراعاتها عليهما وإذا بلغت المرأة فان اذن الولي المجبر من الكماليلت وهو شرط الكمال وليس شرط الصحة ولكن لا بد من موافقته قبل العقد.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad atau ikatan suci antara seorang laki-laki dengan wanita yang secara umum bertujuan untuk menghalalkan hubungan keduanya. Dikatakan menghalalkan karena pada awalnya mereka diharamkan bersetubuh, apalagi melakukan hubungan suami istri yang merupakan kebutuhan biologis manusia normal.¹

Menurut Syara' pernikahan adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ²

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij'".

Jalanan hubungan perkawinan manusia dipersatukan oleh sebuah akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Yaitu dengan mengawinkan pasangan dari makhluk yang berlainan jenis laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluknya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut. Maka perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi manusia dalam kehidupannya di alam semesta ini.³

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakaht I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 10.

²Syihabuddin Ahmad bin Salamah, Syihabuddin Ahmad al-Bursī, *al-Qulyūbi 'Umairah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 313.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan **مُنْتَقَا** غليظا, agama membuat beberapa aturan agar tujuan disyari'atkan pernikahan tercapai. Hal itu dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama si perempuan, bila dikemudian hari ada batu sandungannya yang tidak diinginkan muncul dalam behera perkawinan mereka.⁴

Perkawinan merupakan sebuah ajaran syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW,⁵ sehingga di dalam perkawinan tersimpan sebuah tujuan, diantaranya tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:⁶

a. Melaksanakan libido seksual

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Melalui perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, dan begitu juga sebaliknya.

b. Memperoleh keturunan yang shaleh

Mendapatkan keturunan yang shaleh/shalehah adalah dambaan setiap orang tua. Anak-anak yang shaleh/shalehah akan selalu berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa mendo'akannya.

⁴Su'udi al-Ashari, "PerspektifKiai Krpyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah", (Yogyakarta: UIN Sunan Kaijaga, 2010),

⁵Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 15.

⁶Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, (Jakarta: Depag RI, 1985), h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Allah dan Rasul-Nya tidak menyukai orang yang *tabattul* (hidup sebagai jejak dan perawan selamanya).

d. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menikah jika telah mampu melaksanakannya, baik spiritual maupun material, baik jasmani maupun rohani. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^٧ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا^٨

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisā': 1)

Di balik sebuah perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tanpa terkecuali, semuanya pasti ada tujuan serta hikmahnya. Begitu juga dengan perkawinan, pasti di dalamnya juga menyimpan hikmah yang sangat mulia, diantaranya:⁸

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h.

⁸M. Shaleh al-Ustaimin, A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya: Roudhotul Gusti, 1992), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami istri dari perbuatan yang tercela (haram).

Kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan dan *dekadensi* (kemerosotan) moral, karena seandainya tidak adanya sebuah syari'at tentang pernikahan niscaya pasti banyak terjadi perbuatan mesum dan perzinahan, dengan demikian moral masyarakat akan mengalami sebuah *problem* sendiri.

Ketiga, memberikan kesenangan (*istimtā*) anantara suami istri yakni dengan adanya saling melakukan hak dan kewajiban masing-masing, maka dengan sendirinya jika hak dan kewajiban antara suami istri telah dilaksanakan, maka keduanya akan memperoleh sebuah kesenangan di dalam rumah tangga tersebut.

Keempat, memperkokoh hubungan antar keluarga dan golongan, begitu banyak sebelum pernikahan antara keluarga satu dengan yang lainnya tidak saling sapa bahkan tidak mengenal, tetapi dengan adanya ikatan perkawinan dengan salah satu anggota keluarganya, maka mereka akan semakin timbul rasa kekeluargaan, karena antar keluarga telah menganggap mereka adalah satu bagian, begitu juga dengan golongan.

Kelima, menjaga kelestarian umat manusia secara bersih dan sehat, karena dengan adanya pernikahan, maka keturunan manusia akan berkembang dan mengalami generasi untuk melanjutkan keberlangsungannya dalam kehidupan.⁹

⁹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah serta tujuan pernikahan di atas, bahwa perkawinan memiliki sebuah misi di dalamnya yang sangat agung semua itu dikemas melalui tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, tetapi meskipun demikian tidak semuanya perkawinan menjadi *masalah* bagi para pihak yang melaksanakannya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan dari berbagai pertimbangan maka jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah ialah sunnah, sedangkan golongan *Dhahiri* mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu yang wajib, tetapi hanya bagi sebagian orang sunnah bagi sebagian yang lain lagi mubah.¹⁰ Hukum melaksanakan perkawinan menjadi beberapa macam yaitu:

Pertama, melakukan perkawinan hukumnya wajib yaitu bagi yang di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina sendainya ia tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.¹¹

Kedua, menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu menikah dan kuat nafsunya, tetapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan haram. Dalam kondisi seperti ini, perkawinan lebih baik dari pada membujang karena membujang (*tabattul*) tidak dibenarkan dalam Islam.¹²

Ketiga, melakukan perkawinan hukumnya haram yakni bagi orang yang mempunyai keinginan tapi dia tidak mempunyai sebuah kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga,

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1988), h. 2.

¹¹Nasiri, *Praktek Prostitusi Ala Yusuf Qardawi Tinjauan Hukum Islam Fatwa Kawin Misyar*, Cet. Ke-3, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 13.

¹²Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2000), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga nantinya jika melakukan sebuah perkawinan akan menelantarkan dirinya dan juga istrinya.¹³

Keempat, melakukan perkawinan hukumnya makruh yaitu jika seseorang yang dipandang secara fisik bahwa orang tersebut sudah pantas untuk menikah, tetapi seseorang tersebut belum adanya suatu biaya untuk kehidupan bagi istri dan anak-anaknya.¹⁴

Kelima, ulama-ulama Islam berdasarkan ketetapanannya mengatakan bahwa sesuatu itu asalnya boleh.¹⁵ Adapun menikah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, maka hukumnya boleh (mubah).

Sebenarnya konsep perwalian dalam perkawinan masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Dari kajian terhadap para ulama *madzhab* (ahli hukum Islam/*fuqaha*) klasik tentang wali nikah, *madzhab* Maliki, Syāfi'i, Hanbali melarang perempuan menikahkannya dirinya dan hanya laki-laki yang boleh menjadi wali nikah, dan mengakui adanya hak *ijbār* wali, hak wali menikahkannya perempuan tanpa persetujuan dari perempuan tersebut. Hak *ijbār* disini adalah hak memaksa seorang wali terhadap anak perempuannya dalam hal ini adalah berhak tersebut diistilahkan dengan wali *mujbir*, yang dimaksud adalah ayah atau kalau tidak ada, kakek.¹⁶

¹³ Abu Bakar Muhammad Syata, *Hasyiah I'ānat al-Thālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1999), h. 234.

¹⁴ Muhammad Ibrāhīm al-Bājuri, *Hasyiah al-Bājuri*, (Beirut: Dār al-Ilmiyah, 1999), h. 25.

¹⁵ Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12.

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi yang demikian menjadi wajar karena diantara redaksi teks al-Qur'an maupun hadis Nabi ada yang mendukung akan eksistensi wali nikah di dalam proses pernikahan secara eksplisit. Itupun dalam proses perjalanannya diperkuat oleh Hukum Nasional sebagai hukum positif yang merupakan "hukum buatan lokal" yang bersumber dari apa yang diuraikan al-Qur'an dan hadis Nabi. Maka praktis sudah, jika apa yang tertera pada Hukum Nasional yang kemudian didukung oleh redaksi al-Qur'an dan Hadis Nabi, semuanya sudah jelas memberikan keterangan lengkap dan pentingnya kehadiran atau peran wali nikah dalam sebuah proses pernikahan.

Akan tetapi, apa yang terlihat dalam proses pernikahan sebagaimana yang ada pada umumnya, terkesan meniadakan bahkan menafikan kemampuan perempuan dalam mengurus dirinya (perempuan). Karena itu, perempuan wajib diberi wali (*al-Wilāyah*) yang akan memberikan penguasaan atas diri perempuan tersebut sebagai makhluk Allah yang diasumsikan kurang dewasa, tidak berdaya, dan tidak mampu mengurus pribadinya. Alasan itulah yang pada akhirnya mewajibkan peran dan eksistensi wali bagi perempuan. Bahkan pada gilirannya kedudukan wali menjadi prasyarat utama atas sahnya sebuah pernikahan.¹⁷ Terjadi dan tidaknya atau berlangsung sah dan tidak sahnya sebuah pernikahan, sangat ditentukan dan tergantung pada keberadaan wali.

Namun lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa wali dalam perkawinan tidak sebagai rukun akan tetapi hanya sebagai

¹⁷Al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina*, (Beirut: Dār al-Fikr, t,t), h. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempurna. Sepintas terkesan bahwa kedudukan wali tersebut, tidak perlu adanya untuk anak gadis dan janda yang sudah dewasa (*baligh*). Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang diberi judul: ***“WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN BAGI GADIS DAN JANDA (BALIGH) MENURUT PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH”***.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Wali *Mujbir* Dalam Perkawinan?
2. Bagaimana keberadaan wali *mujbir* dalam perkawinan menurut Imam Abu Hanifah?
3. Apa relevansinya wali *mujbir* Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia?
4. Apa Urgensinya wali *mujbir*?

Untuk mempermudah pembahasan di dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: bagaimana metode *istinbath* hukum Abu Hanifah tentang penetapan tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis yang sudah dewasa (*baligh*) dan janda, Urgensi dan relevansi serta bagaimana tinjauan *maqasid al-Syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode *Istinbath* hukum dalam penetapan tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*Baligh*) menurut pemikiran Abu Hanifah?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid al-Syari'ah* tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*Baligh*)?

Definisi Operasional

Dari judul Tesis yang dipaparkan di atas, untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah konteks pembahasan. Maka definisi operasional dari judul tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Wali, adalah orang yang memiliki kuasa penuh untuk menjalankan suatu akad nikah atau mengawinkan seorang perempuan. Wali juga berhak untuk melangsungkan sendiri suatu akad nikah itu ataupun mewakilkannya kepada juru nikah. Wali nikah terbagi menjadi dua jenis yaitu wali nasab, wali hakim. Wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, baligh.¹⁸ Dalam istilah fikih wali (*wilayah*) terbagi dua yaitu, wilayah '*Ammah* (umum, yaitu pemimpin pemerintah), dan wilayah *Khashah* (*khusus*), yang diantara bentuknya adalah perwalian dalam pernikahan.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini adalah perwalian dalam pernikahan.

¹⁸Intruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 20.

¹⁹Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mushthalahat wa al-Fadz al-Fa'hiyyah*, Juz III, (Kairo: Dār al-Fadhilah, 1401/1981 M), h. 500.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Mujbir*, yaitu ayah kandung dari perempuan. Hak untuk memaksa anak perempuan untuk menikah hanya dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan wali selain ayahnya tidak memiliki hak paksa. Ayah dalam hal ini disebut wali *mujbir* (wali yang memaksa).²⁰
3. *Madzhab* Hanafi dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M. Nama lengkap Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemikiran Imam Abu Hanifah terkait dengan wali *mujbir* di dalam perkawinan, adapun rincian tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah Tentang tidak wajibnya Wali *Mujbir* Dalam Perkawinan.
2. Mengetahui Bagaimana tinjauan *maqasid al-Syari'ah* tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*Baligh*).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan kajian ini bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan *syar'i* umumnya berkaitan dengan wali dan lebih khususnya hukum Islam.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz, VI, (Beirut: Dār al-Fikr 1409 H/1989 M), h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan keahlian, khususnya terkait wali *mujbir* dalam permasalahan umat.

b. Bagi Peneliti

Dapat melatih kemampuan diri dalam menerapkan teori yang telah diterima selama kuliah memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas dalam berfikir dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan topik yang diangkat.

G. Landasan Teori

Fiqh merupakan produk pemikiran para *fuqaha* (mujtahid) untuk mengeluarkan dan menetapkan hukum dari al-Qur'an atau hadis serta *ijma'* para sahabat. Proses ini lazim disebut dengan *ijtihad*. *Ijtihad* adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang *faqih* untuk memperoleh hukum tingkat *dhanny*. Pintu *ijtihad* bagi para ulama/mujtahid terbuka lebar dengan alasan bahwa hukum-hukum dalam *nash* terbatas, sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas pada yang terbatas.²¹

Wahbah az-Zuhailly lebih berpendapat bahwa adanya perubahan *ijtihad* itu sangat dimungkinkan. Para ahli ushul fiqh bersepakat bahwa perubahan *ijtihad* diperbolehkan, baik dalam permasalahan tertentu maupun koreksi terhadap pendapat suatu *madzhab* secara keseluruhan. Adanya perubahan

²¹Ibrahim Hosen dalam Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijtihad menurut Wahbah az-Zuhaili lebih disebabkan karena perubahan zaman dan keadaan antara suatu masa dengan masa lain, sehingga perlu adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam *ijtihad*. Dengan perubahan *ijtihad* tersebut diharapkan hukum dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.²²

Selain teori *ijtihad*, untuk merekonstruksi konsep hak *ijbār* diperlukan juga teori *qiyās* (konstruksi *masālik al-‘illat*), dimana *qiyās*²³ merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan dalam *nash*, atau oleh pembahasan mujtahid terdahulu. Menurut Ibrahim Hosien, pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah pencarian ‘*illat* yang benar-benar baru. Dengan demikian, penggunaan *qiyās* sebagai salah satu metode *ijtihad* tidak terkait dengan *masālik al-‘illat* gaya lama, hasil ulama terdahulu.²⁴ Tetapi mencoba merekonstruksi ‘*illat* yang terkandung dalam suatu hukum apakah masih relevan atau tidak dengan zaman yang berkembang.

Untuk mengkaji tentang permasalahan konsep wali *mujbir* fiqh klasik serta transformasi pada zaman sekarang ini, maka teori yang digunakan oleh kalangan pemikir Islam seperti Abū Ishāq al-Syātibi dalam bukunya yang fenomenal yakni *al-Muwafaqāt* menguraikan tentang teori *maslahah al-Mursalah*²⁵ dan *maqāshid al-Syari’ah*.²⁶ Kemaslahatan manusia

²² Wahbah az-Zuhaili, *Taghyir al-Ijtihad*, (Beirut: Dār al-Makataby, 2000), h. 11.

²³ *Qiyās* menurut bahasa berarti Analogi, sedangkan menurut istilah adalah:

حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بامر جامع بينهما من حكم أو صفة،

lihat Muhammad ‘Ali al-Syaukany, *Irsyad a-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*, Juz I, (Riyadh: Dār al-Fadhiyah, 2000), h. 840.

²⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Op. Cit. h. 71.

²⁵ Kemaslahatan yang tidak diketahui adanya dalil syar’i yang membatalkannya, tidak pada mengakuinya, tetapi diperoleh dari keterkaitan hukum dengan kemaslahatan bagi manusia, atau menolak kemafsadatan. Disebut juga dengan *istishlah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *masalah daruriyyah* (primer), *masalah hajiyyah* (sekunder), *masalah tahsiniyyah* (tersier). Kemaslahatan tersebut dalam rangka untuk melindungi lima hal yaitu: *hifd al-Dīn* (menjaga agama), *hifd al-'Aql* (menjaga akal), *hifd al-Nasl* (menjaga keturunan), *hifd al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifd al-Māl* (menjaga harta benda). Tujuan syari'at Islam sebagai syari'at yang hadir melalui kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah mewujudkan kemaslahatan. Menurut sifatnya, kemaslahatan mencakup kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum mesti didahulukan (*al-Maslahah al'Ammah muqaddamatun 'ala al-Maslahah al-Khashah*.²⁷)

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pembahasan wali *mujbir*, diantaranya:

1. *Perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di tinjau dari Fikih (Studi kasus di Rokan Hulu)*²⁸ yang ditulis oleh Jalli Sitakar Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Fikih: bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat

²⁶ Al-Syātiby, Ibrahim Ibn Musa, *al-Muwafaqāt fī Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 7.

²⁷ *Ibid*, h. 8.

²⁸ Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)", Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, yaitu: Kepala KUA Kecamatan, dan PPN yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasi URAISI) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat atau ab'at*), maupun dari nasab ke wali hakim karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur, sebagaimana pasal 23 KHI ini sejalan dengan fikih klasik, *al-Bajuri* dan *al-Mughni Muhtaj*, dan *Qulyubi wa 'Umairah*.

Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI; secara hukum fiqih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam ada kemungkinan berpindahnya wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan seorang wanita karena sebab-sebab di atas, terkecuali wali yang enggan, harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Agama.

Status hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim ketika wali yang lebih dekat dan wali yang jauh masih ada, bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama ada dari *al-aqrab* itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, atau *adlal*. Status perpindahan wali ini juga telah ditetapkan di dalam *Bahas al-Masail al-Diniyyah al-Waqi'iyah Mukhtamar XXX NU* di PP. Lirboyo, pada tanggal 21-27 November 1999.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana terjadi pada tiga pasangan pernikahan; Shinta binti Dahlan (20 tahun) dan Doni Suardi bin Munaji (25 tahun) menikah dengan wali hakim/berpindah wali nasab ke wali hakim karena walinya enggan (*adlal*), Winah binti Sukiran (23 tahun) dan Arman bin Ahmad (24 tahun), menikah dengan wali hakim/berpindah wali dari wali nasab ke wali hakim karena walinya jauh dan Khairani binti Muslim (20 tahun) dan Andi bin Idham (22 tahun), menikah dengan wali hakim dari wali nasab ke wali hakim karena walinya sakit dan tidak dapat hadir.

2. “*Kuasa konsep ijbar terhadap perempuan*” Tesis yang ditulis oleh Ikililah Muzayyah Dini Fajriyah, studi atas pengalaman kawin paksa di keluarga ndalem pesantren di Jawa Timur”.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus penelitian utama. Kajian ini dilakukan di lima kabupaten di Jawa Timur yaitu di Malang, Jombang, Jember, Pamekasan dan Pasuruan dengan melibatkan tujuh perempuan anak Kyai sebagai informasi utama.

²⁹Ikililah Muzayyanah Dini Fitriyah, “*Kuasa Konsep Ijbar terhadap Perempuan Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa Di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur*,” Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. “*Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Studi Kritis Hadis dalam Sunan Ibnu Majah*”³⁰ Tesis yang ditulis oleh Ahmad Lubabul Chaliq, tesis ini lebih ditekankan pada studi kritis hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menghasilkan data deskriptif yang berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.³¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam:

- a. Sumber primer yakni, fuqaha yang mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.³² Adapun karya tulis Abu Hanifah diantaranya kitab *Fiqh al-Akbar* dan kitab-kitab *madzhab Hanafi* seperti kitab *Fath al-Qadir*, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*, *al-Mabsūth Syams al-Dīn al-Syarkhasy*, *Bada’i al-Shana’i fi Tartibi al-Syara’i* dan lain-lain.
- b. Sumber sekunder, yakni bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, atau, berupa komentar (*Syarh*) atau ringkasan (*mukhtasar*) atas matan sumber primer.³³ Data sekunder dari

³⁰ Ahmad Lubabul Chaliq, “*Hak Ijbar wali Dalam Perkawinan: Studi Kritis Hadis dalam Sunan Ibnu Majah*” (Tesis IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

³¹ Sumadi Saryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 122.s

³² Cik Hasan Bisri, *Model Peneitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), h. 220.

³³ *Ibid*, h. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini berupa berbagai tulisan baik dalam buku maupun kitab fiqh yang berkaitan dengan wali *mujbir*.

Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya, karena hal tersebut berfungsi untuk mendeskripsikan garis-garis bab yang sistematis dan saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang alamiah dan sistematis. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan. Sebagaimana tulisan ilmiah, bab ini merupakan bagian penting yang mendeskripsikan secara utuh alur berfikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan telaah terhadap subyek dan obyek penelitian. Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga disebutkan metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan poin-poin di atas diharapkan dapat memunculkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan.

Bab dua menjelaskan secara teoritik tentang perwalian dan wali *mujbir*, wali nikah dalam perkawinan, konsep wali *mujbir* dan teori *maqashid al-Syari'ah*.

Bab tiga membahas tentang biografi dan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wali *mujbir* dalam perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab keempat mengemukakan Metode *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*) dan tinjauan *maqasid al-Syari'ah*.

Bab kelima, sebagai bab penutup diutarakan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kesimpulan sekaligus sebagai respon atau jawaban konfirmatif atas berbagai pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga terlihat sejauh mana keberadaan wali *mujbir* menemukan justifikasi dalam Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR SERTA KONSEP MAQASIDAL-SYARI'AH

A. Wali Nikah dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Kata perwalian atau wali berasal dari Bahasa Arab yaitu (ولى), yang berarti pemilik kekuasaan.¹ Secara bahasa wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (نصرة), bisa juga berarti kekuasaan (سلطان) dan kekuatan (قدرة).² Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat *fuqaha* yaitu seorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).³ Wali juga banyak mempunyai arti antara lain:⁴

- a. Orang yang menurut hukum (agama) disertai kewajiban mengurus anak yatim beserta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah pengantin laki-laki).
- c. Orang shaleh (suci), atau penyebar agama.
- d. Kepala pemerintahan.

¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr 1409 H/1989 M), h .

²Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 416.

³Hasan Muarif Ambari, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), h. 243.

⁴Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁵ Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, *Madzhab* Syāfi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.⁶ Abdurrahman al-Jaziri di dalam karyanya *al-Fiqh 'alā Madzahibu al-Arba'ah* mendefinisikan wali sebagai berikut:

أُولَى فِي النِّكَاحِ هُوَ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ⁷

Artinya: Wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnyanya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali”.

Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan diatas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama yang satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian wali dari segi

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 345.

⁶*Ibid*, h. 50.

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir: t.p., 1969),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan.

2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena itu semua orang dapat diterima, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Bagi seseorang yang akan bertindak menjadi wali, ulama fiqih menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:⁸

a. Cakap Hukum (Baligh dan Berakal Sehat)

Syarat yang pertama ini mengecualikan kepada anak kecil dan orang gila. Jadi, anak kecil dan orang gila tidak boleh menjadi wali nikah. Sebab, anak kecil dan orang gila itu berada di bawah perwalian, lantaran pandangannya mengenai kemaslahatan dirinya sendiri tidak sempurna, maka tidak dapat menjadi wali orang lain.

b. Merdeka

Syarat yang kedua ini mengecualikan sifat kebudakan. Jadi budak (hamba sahaya) tidak boleh menjadi wali, sebab budak itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri.

c. Muslim

Tidak sah orang tidak memeluk agama Islam menjadi wali nikah terhadap orang muslim. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi orang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam Surat 'Ali Imran ayat 28:

⁸Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1996), h. 1337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ
اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (Q.S. 'Ali Imran:28)

d. Laki-laki

Syarat yang keempat ini mengecualikan selain sifat laki-laki. Jadi, orang perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah, berdasarkan hadis yang diterangkan di atas. Wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

Tetapi, seperti Imam ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah memiliki pendapat tersendiri yaitu perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat boleh menjadi wali di dalam pernikahan.

e. Adil

Maksud adil di sini adalah wali itu tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, menghindarkan diri dari berbuat dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil atau tidak berbuat munkar.⁹ Adapun

⁹Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian lain mengenai adil yang dimaksud adalah orang yang beragama kepada Allah SWT.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali sebagai berikut:¹⁰

- a. Sempurna keahliannya yaitu: baligh, berakal dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
- b. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin perempuan. Oleh karenanya walinya non muslim tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin yang muslim begitu juga sebaliknya.
- c. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama kecuali *madzhab* Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut *madzhab* Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.
- d. Adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang *sekufu* dan masalah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama. Sedangkan untuk wali fasik tetap diberikan hak kewalian, kecuali jika kefasikannya sudah melampaui batas kewajaran.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menyatakan syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:¹¹

1. Orang merdeka
2. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang diwalinya orang Islam maupun orang non Islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan. Begitu pula tidak boleh wali nikah orang gila atau anak-anak, karena mereka belum dapat mewaliki salah seorang pun, malahan terhadap dirinya, oleh karena itu, dia tidak berhak menjadi wali orang lain.
3. Berakal
4. Beragama Islam, yang dijadikan wali adalah orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang islam.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 41:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾¹²

Artinya: Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). (Q.S. an-Nisā:41)

Ahmad Rafiq dalam Hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.

Kemudian Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz 2, mengenai sifat-sifat negatif bagi seorang wali, maka fuqaha telah sependapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah: islam, dewasa, dan

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 175.

¹²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki, sedang sifat-sifat negatif adalah kebaikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu: kufur, belum dewasa dan wanita.¹³

3. Dasar Hukum adanya Wali

Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah perkawinan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum wali di dalam perkawinan diantaranya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.(Q.S. al-Baqarah:232)

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Dengan mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-Nuzûl*), yang diriwayatkan bahwa Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.¹⁴

Q.S. Surat an-Nûr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. an-Nûr:32)

Selain dari *nash* al-Qur' an di atas, ada beberapa hadis Nabi yang menyatakan tentang adanya wali di dalam pernikahan, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغْوَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ¹⁵

Artinya: Muhammad bin Qudamah bin 'Ayan dan Abu Ubaidah al-Haddad bercerita kepada kami dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Musa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali ” (HR. Abī Dāwud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ
مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تُشَاجَرُ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ وَلِيَ لَهُ¹⁶

¹⁴Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzûl*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1987), h. 78.

¹⁵Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Dārussalām, 2008), h. 1376. Hadis Nomor 2085.

¹⁶*Ibid*. Hadis Nomor 2083.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpulkan perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”(HR. Abī Dāwud).

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا¹⁷

Artinya: “Jamil bin Hasan al-Ataki, Muhammad bin Marwan al-Uqaili dan Hisyam bin Hasan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan lain dan juga tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan zina adalah orang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri”(HR. Ibn Majah).

Dari ketiga hadis di atas, walupun redaksinya berbeda namun semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali di dalam pernikahan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri.

4. Wali Nikah dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai

¹⁷Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Dārussalām, 2008), h. 2589. Hadis Nomor 1882.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri. Secara implisit bunyi pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan pada 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Apabila ketentuan wali nikah ini tidak dilaksanakan, pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan.¹⁸

Sehubungan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Maka pernikahan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah *bathil* atau nikah rusak. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengetahui adanya cacat hukum dalam pernikahan tersebut segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Hal ini penting

¹⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dilaksanakan dengan maksud agar hukum Islam tetap responsif terhadap situasi dalam rangka mewujudkan ketertiban bagi masyarakat.¹⁹

5. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Begitu pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan digambarkan dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam KHI pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selanjutnya wali nikah dibedakan atas dua macam, *pertama* wali nasab yaitu wali hak berhak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain. Dalam hal ini KHI merincinya dalam pasal 21, 22 dan 23.

Pasal 21 KHI²⁰ menjelaskan:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Tim Citra Umbara, *UU NO 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 234.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 KHI²¹ mengatakan:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Secara keseluruhan urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah

²¹ *Ibid*, h, 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek kandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Apabila wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sulthan) yang biasa disebut dengan wali hakim.

Pasal 23 KHI:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

6. Peran Wali dalam Perkawinan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, yakni apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Hal ini, sejalan dengan hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh 'Aisyah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا امْرَأَةٌ تَكَحُّتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ²²

Artinya: “Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpulkan perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (HR. Abī Dāwud).

Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَهْمَشَامٍ الْبِرَازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُطِيرِيُّ قَالَ: عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ, يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ, عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَثِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ²³

Artinya: “Ali bin Muhammad bin Hisyam Biraz dan Ja’far Muthiriy berkata: ‘Isa bin Abi Harbin, Yahya bin Abi Bakir, ‘Adi bin Fadhil, dari ‘Abdullah bin Umar bin Khasim, dari Sa’id bin Jabir, dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah pernikahan tanpa disertai wali dan dua orang saksi yang adil”.(HR. Ibnu Abbas)

At-Tirmidzi menambahkan: “Bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, seperti Umar bin Khattab, ‘Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan lainnya berpegangan pada hadis ini. Demikian pula dengan para fuqaha dari kalangan *tabi’in*, dimana mereka mengatakan: “pernikahan tidak sah tanpa adanya wali”.Diantara mereka itu terdapat Sa’id bin Musayyad, Hasan Basari, Shuraih, Ibrahim an-Nakha’i, Umar bin ‘Abdul Aziz, dan lainnya.

²² Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, Loc. Cit, h. 1376. Hadis Nomor 2085.

²³ Ali bin Umar Dāruqutni, *Sunan Dāruquthni*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat yang sama ini juga disampaikan oleh Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Ahmad bin Ishaq. Wali yang dimaksud adalah ayah kandung, kakek, saudara, paman, dan putra paman meskipun hubungannya jauh. Akan tetapi, hubungan yang lebih dekat adalah lebih utama.

Madzhab Syāfi'i kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan tentang diwajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan adalah:

اتَّقِ الْمَلَائِكَةَ وَالشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ عَلَىٰ ضَرُورَةٍ وَجُوداً لِّوَلِيٍّ فِي النِّكَاحِ فَكُلُّ نِكَاحٍ يَقَعُ بِدُونِ
الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَنْتُوبُ مِنْهُ يَقَعُ بَاطِلاً فَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَبَاشُرُ عَقْدٍ زَوَاجِهَا بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ
سَوَاءً كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ جُنُونَةً إِلَّا إِنْهَا كَانَتْ شَبِيهَةً إِلَّا يُصْلِحُ زَوَاجِهَا بِدُونِ
إِذْنِهَا وَرِضَاهَا

Artinya: "Telah sepakat golongan Malikiyah, Syāfi'iyah, dan Hanabilah atas pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dari itu, tidak ada seseorang perempuan pun yang dapat melakukan atau meangsungkan akad nikahnya, baik gadis telah dewasa, kecil, janda, maka disini seorang wali dianggap kurang baik bila degan kemauannya menikahkan tanpa seizin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya."²⁴

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam *madzhab* Hanafi, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang gila, atau boleh pula mengawinkan dirinya

²⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir: t.p. 1969), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengawinkan dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang gila tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, qabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul)

Jadi, dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan anaknya, maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*. Hal yang senada juga juga dikatakan oleh Abu Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan oleh walinya. Tetapi jika ia menikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, lalu keduanya mengadakan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun menetapkan sah pernikahan itu, maka tidak boleh hakim itu membatalkan.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman Q.S. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. al-Baqarah: 234)

Dengan ayat tersebut menjadi dalil tentang kebolehan seorang perempuan bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang sangat rasional, karena wali hanya diperlukan bagi anak perempuan yang masih kecil atau bagi mereka yang telah dewasa, namun secara umum tidak dapat dianggap mampu untuk berbuat hukum (karena kurang akal atau gila) atau istilah lain, mereka yang telah dewasa berhak menikahkan dirinya sendiri dengan syarat yang di nikahi *sekufu*. Dalam hali ini wali pun masih berhak membatalkan akadnya.

Demikian pula *madzhab* Hanabilah, adanya wali menjadi syarat sah nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah sebagaimana dijelaskan dalam *al-Fiqh madzahibu al-Arba'ah* yaitu:

²⁵ *النَّحَابِلَةُ: لِلنِّكَاحِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: الشَّرَاطُ الثَّلَاثُ: أَلْوِي*

Artinya: *Golongan Hanabilah berpendapat: untuk dijadikan sahnya nikah terdapat empat syarat: syarat yang ketiga yaitu adanya wali”.*

Kemudian dalam *fiqh lima madzhab* menyebutkan bahwa mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tidak ada seorang pun yang berhak melarangnya ia mempunyai hak yang sama persis kaum laki-laki.

²⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal senada juga disampaikan Abdurrahman I Doi dalam *Inilah Syari'at Islam* bahwa para ulama *madzhab* dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhnya sebagai salah satu sahnya perkawinan dalam Islam. Sedang *madzhab* Hanafi dan Hanbali menganggap izin wali hanya sebagai salah satu syarat saja. Kedua *madzhab* terakhir ini justru menekankan pentingnya ijab dan qabul.

Dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan pernikahan untuk dirinya maupun untuk orang lain, tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali) maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fikih.²⁶

Demikian itu, sangatlah jelas menandakan bahwa peranan wali begitu penting di dalam perkawinan sehingga wali dikategorikan sebagai rukun nikah.

7. Macam-macam Wali

Wali di dalam perkawinan dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.²⁷

²⁶Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 48.

²⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syāfi'i*, (Edisi engkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syāfi'iyah, Hanabilah, Dhahiriyyah, dan Syi'ah Imamiah membagi nasab menjadi dua bagian yaitu:²⁸

Pertama: wali dekat atau wali *aqrab* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak kepada anak perempuannya yang masih muda yang di dalam pengampuannya yaitu untuk menikahkan mereka tanpa harus meminta persetujuan dari anak gadisnya atau kekuasaan ini disebut dengan wali *mujbir*. *Kedua:* wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek.

Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah
 - a) Anak, cucu ke bawah
 - b) Ayah, kakek ke atas
 - c) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah
 - d) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah
 - e) Orang yang memerdekakan
 - f) Kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*), dan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Sulthan atau wakilnya.
- 2) Menurut Malikiyah
 - a) Anak, cucu ke bawah
 - b) Ayah
 - c) Saudara kandung, saudara seayah,, anak saudara kandung, anak saudara seayah
 - d) Kakek
 - e) Paman seayah, anak paman seayah
 - f) Paman kakek, anak paman kakek
 - g) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya
 - h) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga akil baligh
 - i) Hakim
 - j) Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada)
- 3) Menurut Syāfi'iyah
 - a) Ayah, kakek ke atas
 - b) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
 - c) Paman
 - d) Keturunan lainnya (seperti hukum waris)
 - e) Orang yang memerdekakan, keturunannya
 - f) Sulthan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menurut Hanabilah

- a) Ayah
- b) Kakek ke atas
- c) Anak, cucu ke bawah
- d) Saudara kandung
- e) Saudara seayah
- f) Anak saudara ke bawah
- g) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah
- h) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah
- i) Orang yang memerdekakan, dan
- j) Sulthan

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya (umpamanya sebagai penguasa atau (*qadhi*) berhak melakukan akad pernikahan. Hak itu didapatnya berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab menurut cara-cara tertentu.

Lebih jelasnya yang dimaksud wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara.²⁹ Di Indonesia, kepala negara ialah presiden telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Apabila

²⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.³⁰

c. Wali *muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu *fiqh*-nya terutama tentang *munakahat* berpandang luas, adil, Islam dan laki-laki.³¹

Wali *muhakkam* yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim*, “*Saya angkat Bapak atau Saudara untuk menikahkan saya pada si....(calon istri), dengan mahar....dan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang*”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “*Saya terima tahkim ini. Tahkim terjadi apabila*.”³²

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab *ghaib* atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ
- 3) Tidak ada *qadhi* atau pegawai pencatatan nikah, dan rujuk

³⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 97.

³¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 39.

³²Syaikh, dkk., *Perbandingan Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Madzhab*, (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Wali *Maulā*

Wali *maulā* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini, dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³³

Perwalian di dalam perkawinan menurut *madzhab* Hanafi termasuk ke dalam perwalian terhadap jiwa, sedangkan perwalian di dalam perkawinan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu:³⁴

1) Perwalian yang bersifat *Ijbār/Hatmin*

Perwalian *Ijbār/Hatmin* yaitu pengucapan perkataan/perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dalam perwaliannya.³⁵

2) Perwalian yang bersifat *Ikhtiari (Sukarela)*

Perwalian yang bersifat *Ikhtiari (Sukarela)* adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya berdasarkan pilihan dan juga kerelaannya.³⁶

Perwalian tersebut ditetapkan dengan empat sebab yaitu, kekerabatan, kepemilikan, pemerdekaan (*Wala'*), dan Imam.³⁷ Keterangan adalah sebagai berikut:

³³M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Hindakarya Agung, 1999), h. 49.

³⁴Kamāl al-Dīn Muhammad bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarh Fathul al-Qadīr*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 246.

³⁵Fakhru al-Dīn Usman bin Ali, *Tabyinu a-Haqāiq*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t,t), h. 493.

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Op. Cit, h. 192.

³⁷Fakhru al-Dīn Usman bin Ali, *Tabyinu a-Haqāiq*, Op. Cit. h. 493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Perwalian Kekerabatan

Perwalian kekerabatan adalah perwalian yang ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah/adanya kekerabatan antara wali dan orang yang berada dalam perwaliannya, baik kekerabatan itu bersifat dekat seperti halnya bapak, kakek, anak atau akibat kekerabatan yang bersifat jauh seperti halnya anak laki-laki paman dari pihak ibu, dan anak laki-laki paman dari pihak laki-laki.³⁸ Urutan perwalian dari sebab kekerabatan adalah seperti dibawah ini:³⁹

- a) Anak dan anaknya anak sampai nasab ke bawah
- b) Bapak dan kakek yang asli dan nasab keatasnya
- c) Saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seapak dan nasab kebawahnya
- d) Paman sekandung, dan paman seapak serta anak laki-lakinya dan nasab kebawahnya
- e) Kemudian setelah itu orang yang memerdekakan budak dan kerabat 'Ashabah-nya secara nasab.

2) Perwalian Akibat Kepemilikan

Perwalian kepemiikan adalah perkawinan akibat adanya kepemilikan itu antara seorang majikan (*Sayyid*) terhadap budak-budaknya.⁴⁰

³⁸ Alauddin Abi Ibn Mas'ud, *Badā'i'u al-Shān'ani*, Juz II, (Damasqus: Dār al-Fikr, t.t), h. 356-357.

³⁹ Kamāl al-Dīn Muhammad bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarh Fathul al-Qadīr*, Op. Cit, h. 268-269.

⁴⁰ Alauddin Abi Ibn Mas'ud, *Badā'i'u al-Shān'ani*, Op. Cit, h. 355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perwalian Akibat Pemerdekaan

Perwalian akibat pemerdekaan atau dikenal dengan *wala'* dibagi menjadi dua yaitu:⁴¹

a) Perwalian *Wala' al-Ātiqah*

Perwalian akibat pemerdekaan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh *sayyid* (tuan) untuk memerdekakan budaknya untuk itu seorang *sayyid* juga berhak untuk mengawinkan orang yang mereka merdekakan, baik itu anak kecil, orang dewasa, orang gila atau orang idiot, syaratnya adalah orang yang memerdekakan harus berakal dan sudah baligh.

b) Perwalian *Wala' al-Muwālah*

Perwalian *Wala' al-Muwālah* ini adalah perwalian akibat adanya sebuah akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia meninggal, oleh karenanya hak mengawinkan juga berada di bawah kekuasaan *al-Muwālah* syaratnya adalah adil, baligh, berakal, merdeka.⁴²

4) Perwalian Imam

Perwalian Imam adalah perwalian dari seorang pemimpin suatu daerah yang adil beserta wakilnya, pemimpin ini cakupannya juga seperti *qadhii* masing-masing keduanya memiliki wewenang untuk

⁴¹*Ibid*, h. 375.

⁴²*Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah atau kurangnya kemampuan untuk menikah.⁴³

B. Konsep Wali Mujbir

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* atau *al-wilayah*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*.⁴⁴ Ditinjau dari segi *etimologi* (bahasa) kata wali merupakan bentuk dari *isim fa'il* yang berasal dari *fi'il madhi* (والى - ولاية فهو وال) yang semakna dengan (النصير) yang berarti menolong dan (الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (احد من ولى امر) yang berarti orang yang mengurus/menolong perkara seseorang.⁴⁵ Sedangkan kata (مجبِر) bentuk *isim fa'il* yang berasal dari kata (اجبر - يجبر - اجبارا) berarti memaksa. Pengertian sama dengan yang terdapat dalam kamus arab munjid.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah Q. S al-Maidah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang. (Q.S. al-Maidah:56)

⁴³ Ibid. h. 376.

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: 1987), h. 1582.

⁴⁶ Inis Ma'ruf, *Munjid*, (Beirut: Dār al-Musyrik, tt), h. 918.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Madzhab* Hanafi

a. Pengertian Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* menurut *madzhab* Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.⁴⁷

b. Obyek Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, tetapi hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam *madzhab* Hanafi ada obyek dari wali *mujbir* yaitu *al-Shaghīrah* (anak perempuan kecil), ‘*illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh *madzhab* Hanafi bahwa *al-Shaghīrah* dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya *aqal* di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemillihan pasangan atau juga dalam hal *aqad*.⁴⁸

Madzhab Hanafi juga beragumen bahwa wilayah wali *mujbir* adalah sebatas *al-Shaghīrah* (anak perempuan kecil) karena hukum pernikahan dipersamakan (*qiyās*) dengan hukum jual beli, yaitu di dalam jual beli dan perkawinan memiliki ‘*illat* (alasan) hukum yang sama, karena di dalam jual beli ada sebuah *aqad* yang menjadikan status jual beli tersebut sah secara syari’at dan juga disyaratkan bagi orang yang ber-*aqad* jual beli harus orang yang sudah baligh, hal ini untuk

⁴⁷Fakhrūl al-Din Usman bin Ali, *Tabyīn al-Hahoiq*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 493.

⁴⁸Kamāl al-Dīn Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami. *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari adanya jual beli *gharar* (penipuan), kemudian di dalam pernikahan juga membutuhkan sebuah *aqad*, dan *aqad* tersebutlah yang menjadikan sah secara syari'at, oleh karenanya semestinya *aqad* harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, apabila orang yang akan menikah *al-Shaghīrah* (anak perempuan kecil) maka agar *aqad*-nya sah secara syari'at, maka *aqad* tersebut harus diwakili oleh walinya.⁴⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ إِبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا (رواه أحمد وأبو داود)⁵⁰

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra Bahwa Jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah SAW. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih.” (HR. Ahmad, Abu Daud)

Hadis tersebut merupakan sandaran bagi *madzhab* Hanafi, dari

hadis tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek wali *mijbir* adalah *al-Shaghīrah* (anak perempuan kecil), sesuai hadis tersebut bahwa ketika seorang *al-Bikārah* (gadis) yang sudah baligh seperti yang disebutkan di dalam lafadz *جارية* maka hak *ijbār* yang diwakili wali *mujbir* tidak berlaku lagi. *Madzhab* Hanafi juga mengomentari hadis yang seakan-akan berbeda pendapat beliau salah, salah satunya hadis berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَهَ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحَ الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Dār al-Islam, tt), h. 1377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.” Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “ ia diam.” (HR. Abu Dawud).

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا (رواه أبي داود)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam.”⁵¹(HR. Abi Dāwud)

Madzhab Hanafi menanggapi hadis lain yang seakan-akan berbeda dengan pendapat bahwa yang dijelaskan di dalam matan hadis di atas adalah khusus الایم (janda) yakni ada teks yang jelas dan tegas menunjukkan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri, tetapi dalam konteks البکر hadis di atas tidak berbicara secara jelas dan tegas ketika membicarakan الایم (janda).

Madzhab Hanafi dalam hal ini mengeneralisirkan ‘illat (alasan) hukum dari hak *ijbār* yang dimiliki wali *mujbir* yaitu *al-Shaghīrah* (anak perempuan kecil), jadi apabila ada kasus anak kecil menikah kemudian ditalak sebelum baligh, maka wali *mujbir* masih memiliki hak *ijbār*-nya, senada dengan hadis tersebut bahwa janda lebih berhak atas dirinya adalah ketika janda sudah baligh.⁵² Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa meminta izin pada gadis bukan kewajiban melainkan hanya sebatas sunnah, karena melihat konteks hadis yang tidak tegas dalam

⁵¹ Ibid

⁵² Muhammad Amīn Ibn ‘Abidin, *Raddul al-Mukhtār ‘Ala al-Dar al-Mukhtār*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 170-171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskannya, karena secara akal bisa saja nabi bersabda *والبكر احق* tetapi tidak pada redaksi matan hadis di atas.⁵³ Hal ini menunjukkan tidak adanya perintah wajib.

c. Orang Yang Berhak Menjadi Wali *Mujbir*

Wali mujbir menurut *madzhab* Hanafi hanyalah terbatas kepada perwalian dari jalur '*ashabah*, pengertian '*ashabah* disini sama dengan konteks '*ashabah* waris, tentunya masih memperhitungkan *mahjûb* dan mendahulukan '*ashabah* yang paling dekat berikut ini:

- 1) Bapak sampai nasab ke atas
- 2) Saudara laki-laki kandung
- 3) Saudara laki-laki seayah
- 4) Anak dari saudara laki-laki
- 5) Anak dari saudara laki-laki seayah
- 6) Paman kandung
- 7) Paman seapak
- 8) Anak dari paman kandung
- 9) Anak dari paman seapak
- 10) Pamankakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab ke bawah.⁵⁴

Madzhab Hanafi menentukan bahwa wali *mujbir* adalah wali semua dari jalur '*ashabah*, dan kemudian jika ternyata '*ashabah* tidak ada maka yang menjadi wali *mujbir* adalah Imam. Sedangkan dalam konteks perwalian untuk orang gila *madzhab Hanafi* pendapatnya

⁵³Kamāl al-Dīn Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami. *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 245

⁵⁴*Ibid*, h. 268.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dengan perwalian terhadap orang yang mempunyai akal sehat, bahwa perwalian terhadap orang gila lebih umum yaitu baik untuk laki-laki atau perempuan, sudah baligh atau belum baligh semua perwaliannya adalah bersifat *ijbār*.⁵⁵

d. Syarat-Syarat Wali *Mujbir*

Hak dari wali *mujbir* adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu berlaku mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali *mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbār* tersebut, karena *madzhab* Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbār* dari wali *mujbir* mampu menghadirkan calon suami yang *kafa'ah* dengan si gadis, *kafa'ah* yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Nasab
- 2) Merdeka
- 3) Agama
- 4) Harta
- 5) Pekerjaan

Persyaratan yang diberikan oleh *madzhab* Hanafi terhadap pemberlakuan hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan *baligh*, tetapi ternyata calon suami

⁵⁵Muhammad Amīn Ibn 'Abidin, *Raddul al-Mukhtār 'Ala al-Dar al-Mukhtār*, Juz IV, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 170-171.

⁵⁶Kamāl al-Dīn Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami. *Syarh Fathu al-Qadir*, Juz II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 280-287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadirkan tidak *kafa'ah* dengan anak gadisnya, maka sigadis berhak menolak dan apabila tetap dilakukan *aqad* nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.⁵⁷ Sedangkan syarat wali nikah secara umum adalah sebagai berikut: 1) *Baligh*, 2) Berakal, 3) Bisa mewarisi (beragama Islam).

2. *Madzhab* Syāfi'i

a. Pengertian Wali *Mujbir*

Wali *Mujbir* adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.⁵⁸ Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali *ghairu mujbir*.⁵⁹

b. Obyek Wali *Mujbir*

Menurut *madzhab* Syāfi'i bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-Bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut *madzhab* Syāfi'i yang menjadi *'illat* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-Bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut *madzhab* Syāfi'i yang menjadi *'illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbār* yang dimiliki adalah wali *mujbir* adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih

⁵⁷ Muhammad Amīn Ibn 'Abidin, *Raddul al-Mukhtār 'Ala al-Dar al-Mukhtār*, Juz IV, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 206-207.

⁵⁸ Al-Imam al-Nawawī, *Majmū' Syarah al-Muhadhab*, Jilid XVI, (Kairo: Dār al-Hadith, 2010), h. 409.

⁵⁹ Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 274.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-Bikr*), *tendensi* hukum yang dipakai oleh *madzhab* Syāfi'i adalah hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam" (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karena itu pemahaman baliknya (*mafhum mukhalafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-Bikr*), maka hak perkawinannya dipegang oleh walinya.⁶⁰

Sedangkan lafadz تستامر بنفسها yang tertera di dalam matan hadis di atas, dimaknai oleh *madzhab* Syāfi'i bahwa hal itu menunjukkan adanya perintah yang bersifat *sunnah*, karena perintah tersebut menggunakan redaksi yang tidak tegas, berbeda ketika berbicara tentang masalah janda hak perkawinannya dipegang oleh dirinya sendiri. Janda yang dimaksud matan hadis di atas menurut *madzhab* Syāfi'i adalah janda yang pernah bersetubuh.⁶¹

Batasan gadis (*al-Bikr*) menurut *madzhab* Syāfi'i adalah ketika seseorang tersebut belum pernah *jimā'* (bersetubuh) sama sekali, dari pemahaman ini maka memasukan seorang janda yang diceraikan suaminya *qabla dukhul* (belum pernah disetubuhi) perwaliannya

⁶⁰ Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Dār al-Islam, tt), h. 1377.

⁶¹ Muhammad Shatā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu al-Talibīn*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), h. 563.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk ke dalam wali *mujbir*. Sedangkan jika seseorang kehilangan kegadisannya dikarenakan selain dari *jimā'* (bersetubuh) seperti halnya terkena benda tumpul, atau karena jari-jarinya maka secara hukum, dia masih dianggap sebagai gadis (*al-Bikr*)⁶²

c. Orang Yang Berhak Menjadi Wali *Mujbir*

Menurut *madzhab* Syāfi'i yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali *mujbir*, hal ini didasarkan pada hadis berikut.⁶³

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (رواه أبي داود)⁶⁴

Artinya: Umar bin Khattab ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaannya". (HR. Abī Dāwud)

Hadis tersebut menjadi sandaran bagi *madzhab* Syāfi'i bahwa yang menjadi wali *mujbir* adalah bapak, hal ini didasarkan pada *asbabul wurud* hadis tersebut yakni, pada saat itu Usman bin Mulghun mengawinkan keponakan perempuannya, keponakan Usman bin Mulghun pada saat itu dalam keadaan yatim, kemudian ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah saw dan mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuannya tidak suka dengan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Al-Imam al-Nawawī, *Majmū' Syarah al-Muhadhab*, Jilid XVI, (Kairo: Dār al-Hadis, 2010), h. 409.

⁶⁴ Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Dār al-Islam, tt), h. 1377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihan pamannya (Usman bin Mulghun) akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya.⁶⁵

Penjelasan mengenai *asbabul wurud* hadis di atas, dapat dipahami bahwa *madzhab* Syāfi'i selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali *mujbir* karena dari *asbabul wurud* hadis tersebut, diterangkan bahwa posisi Usman bin Mulghun adalah paman gadis yang dinikahkan, tetapi kemudian Nabi menyuruh ibunya untuk memisahkan keduanya, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa paman tidak termasuk golongan wali *mujbir*. Karenanya *madzhab* Syāfi'i berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali *mujbir* hanyalah bapak dan kakek.

Tidak hanya hadis di atas yang dijadikan sandaran hukum oleh *madzhab* Syāfi'i terkait hanya bapak dan kakek saja yang berhak menjadi wali *mujbir*, tetapi ada hadis lain yang dijadikan sandaran hukum oleh *madzhab* Syāfi'i:⁶⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا بِنُ نَمِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ بَيَوتًا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه النسائي)

Artinya: Dari Yahya bin Yahya, Abu Mu'awiyah mengabarkan dari Hisyam dari ibn Urwah, Numair mengabarkan 'Abdah dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah berkata "Saya dikawinkan dengan Rasulullah dan umur saya enam tahun dan Rasulullah SAW membangun rumah tangga denganku ketika saya umur sembilan tahun".⁶⁷ (HR. An-Nasā'i)

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ Al-Imam al-Nawawī, *Majmū' Syarah al-Muhadhab*, Jilid XVI, (Kairo: Dār al-Hadis, 2010), h. 409.

⁶⁷ An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i al-Sughra*, (Riyad: Dar al-Islam, tt), h. 2299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa Siti 'Aisyah dikawinkan dengan Rasulullah ketika berumur enam tahun, pernikahan tersebut tanpa meminta izin kepada 'Aisyah terlebih dahulu, dalam artian perwaliannya pada saat itu adalah wali *mujbir*, dan beliau 'Aisyah dinikahkan oleh ayahnya.

d. Syarat-Syarat Wali *Mujbir*

Menurut *madzhab* Syāfi'i bahwa hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* yaitu mengawinkan seorang anak gadis yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa persetujuannya, tetapi tidak semata-merta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, melainkan *madzhab* Syāfi'i memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir* sebelum haknya digunakan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas
- 2) Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan
- 3) Calon suami harus *sekufu* dengan gsdis
- 4) Mampu membayar mahar
- 5) Maharnya berupa mahar *mitsil*
- 6) Maharnya dengan kriteria di daerah tersebut
- 7) Maharnya harus diserahkan secara langsung

Pada persyaratan poin ke tiga yakni seorang wali *mujbir* mampu menghadirkan seorang calon suami bagi si gadis dengan kriteria sekufu,

⁶⁸Muhammad Shatā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu al-Talibīn*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 508.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud sekufu menurut *madzhab* Syāfi'i memiliki lima kriteria sebagai berikut:⁶⁹

1. Nasab
2. Merdeka
3. Agama
4. Harta
5. Pekerjaan

Seorang wali *mujbir* jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak *ijbār* dari wali *mujbir* dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali *mujbir* tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka *aqad*-nya tidak sah.⁷⁰ Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali.⁷¹

Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon pengantin wanita (istri) dan mengetahui keridhaannya sebelum diadakan. Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelenggangan

⁶⁹Sulaiman bin Muhammad Ibn Umar, *Hashiyah Bujairamī*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 418-420.

⁷⁰*ibid*, h. 563.

⁷¹Al-Imam al-Nawawī, *Majmū' Syarah al-Muhadhab*, Jilid XVI, (Kairo: Dār al-Hadith, 2010), h. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya.⁷²

Madzhab Syāfi'i berpendapat bahwa perwalian untuk orang gila baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga statusnya janda atau masih gadis, serta belum baligh menurut *madzhab* Syāfi'i perwaliannya tetap bersifat *mujbir*, hal ini bertujuan agar lebih maslahah.⁷³

3. *Madzhab* Hanbali

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak *ijbār* wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis.⁷⁴ Imam Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali⁷⁵. Maka itu hak wali *ijbār* itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya. Karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali.

Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya, atau tidak sehat akal nya. Oleh karena itu perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Kecuali janda

⁷²Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 16.

⁷³Muhammad Shatā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu al-Talibīn*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), h. 566.

⁷⁴Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syāfi'i*, (Malang: Malang Press, 2009), h. 117.

⁷⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diminta izin dan ridhanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak *ijbār* (wali *mujbir*) dan orang menjadi wali *mujbir* tersebut dalam perkawinan, Imam Hanbali berpenadapat sebagai berikut:

a. Anak kecil

Para ulama *madzhab* sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut ulama sebagian dari Syāfi'i.

b. Orang gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama *madzhab* terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat *madzhab* Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim.⁷⁶

c. Orang Safih atau Idiot

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena *safih* (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.

⁷⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 694.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara menurut Imam Hanbali akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

d. Wanita yang *baligh* dan berakal sehat

Imam Hanbali berpendapat jika wanita yang *baligh* dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada keduanya, artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali. Namun pengucapan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.

4. *Madzhab Maliki*

Menurut *madzhab* Maliki, hak *ijbār* wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak *ijbār* wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya.⁷⁷ Dengan pemikiran Imam Malik tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali.⁷⁸

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ وَالْأَلْفُ لَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي يُّيَ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ (رواه مسلم)⁷⁹

Artinya: Dari Yahya bin Yahya, Abu Mu'awiyah mengabarkan dari Hisyam dari ibn Urwah, Numair mengabarkan Numair dari

⁷⁷ Ibn Rusdy al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 31.

⁷⁸ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (), h. 46.

⁷⁹ Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shāhih Muslim*, (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), h. 604.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Abduh bin Sulaiman dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah berkata "Saya dikawinkan dengan Rasulullah dan umur saya enam tahun dan Rasulullah SAW membangun rumah tangga denganku ketika saya umur sembilan tahun". (HR. Muslim)

Memang tidak ada nash al-Qur'an yang menerangkan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan yang secara isyarat menunjukkan menghendaki adanya wali. Menurut Imam Malik dasar nash tersebut adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 232)

Dalil-dalil yang diatas menunjukan bahwasanya dalam perkawinan mewajibkan adanya wali. Oleh karena itu, posisi wali sangat dibutuhkan. Jadi hak *ijbār* (wali mujbir) itu diperbolehkan, karena kedudukan wali tersebut paling utama dan jika tidak ada wali maka perkawinan tidak sah.

Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya sunnah, karena adanya wali merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Maliki berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahkannya berarti ada hak *ijbār* wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon mempelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbār* wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh *ijbār* (wali *mujbir*) dan orang menjadi wali *mujbir* tersebut dalam perkawinan, Imam Malik berpendapat sebagai berikut:

1. Anak kecil

Imam Malik mengatakan: walinya yaitu ayah dan sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i, sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah. Dan ibu tidak mempunyai hak perwalian, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, apalagi kakek dari pihak ibu.

Ulama Maliki menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashabah* sebagai wali nasab dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya. Bahkan kedudukannya lebih utama dari pada ayah dan kakek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang Gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat *madzhab* Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian pada wali hakim.

3. Orang *Safih* (Idiot)

Madzhab Maliki berpendapat sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak *safih* (idiot). Sementara Maliki mengatakan akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

4. Wanita yang baligh dan berakal sehat dan janda

Imam Maliki berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi bagi janda tidak ada hak *ijbār* wali dari atau dengan kata lain wali *mujbir* tidak terdapat dalam perkawinan janda. Posisi perwalian pernikahan janda yang mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja.

Dari golongan empat diatas peran hak *ijbār* (wali *mujbir*) dapat dilakukan pada tiga golongan yaitu kepada anak kecil, orang gila, dan anak *safih* (idiot), karena mereka sama sekali tidak bisa melaksanakan dan belum mampu untuk melakukan perkawinan dan belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi orang sudah baligh dan janda, peran wali *mujbir* tidak diperbolehkan memaksa secara penuh, akan tetapi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak jika akan melaksanakan perkawinan, yaitu dari pihak wali maupun dari pihak perempuan.

Meskipun demikian Imam Malik tidak memperbolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai janda harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali memiliki hak *ijbār*, dan bila bukan walinya bapak maka tidak memiliki hak *ijbār*.

Dalam masalah perwalian Imam Malik membagi wali menjadi dua yaitu wali *ikhtisah* (khusus) dan wali *'ammah* (umum). Perwalian khusus hanya dimiliki orang-orang tertentu seperti ayah, kakek, atau pemimpin Negara. Perwalian umum perwalian yang disebabkan satu hal yakni keIslaman, perwalian ini dimiliki setiap muslim. Oleh karenanya jika ada perempuan ingin menikah tapi tidak mempunyai wali ayah dan keluarga lainnya, maka laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut. Dan menanggapi hak *ijbār* bahwasanya yang berhak menjadi wali adalah ayah, dan apabila tidak ada maka diserahkan kepada hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Konsep Yusuf Qardhawi

a. Pengertian Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang hanya diminta persetujuan dan izinya. Dengan demikian seorang gadis berhak menentukan atas pilihan yang dikehendaknya tanpa ada paksaan dari orang tuanya atau wali yang menyerahkan urusan memilih calon suami kepada anak gadis sepenuhnya. Jadi, ada kerelaan antara anak perempuannya dan orang tua.

b. Obyek Wali *Mujbir*

Obyeknya adalah anak gadis atau perawan, janda yang sudah baligh. Dan ayah harus meminta izin persetujuan kepada anak gadisnya jika, ingin menikahkan dengan calon suami pilihannya atau dijodohkan. Sedangkan si gadis berhak menolak jika, calon suami tidak setara dengannya. Harus ada kerelaan anak perempuan dan orang tua, dan calon suami harus setara dengannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْبُ أَحَقُّ لِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَأَذْنُهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya kepada gadis perawan diminta persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam". (HR. Muslim)

Seorang gadis mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya, karena Nabi SAW menyarankan masalah ini kepadanya, ia pun bersabda: "Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini.⁸⁰

c. Syarat-Syarat Wali *Mujbir*

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang kriteria dengan memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan pernikahan di dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Rasulullah SAW bersabda:

إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَادُّنُّهَا صِمَاتُهَا (رواه أبي داود)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam”(H.R. Abi Dawud)*

Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahan itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.⁸¹

⁸⁰Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), h. 241.

⁸¹Ghazali Mukri, *Terjemahan, Panduan Fikih Perempuan*, Karya Yusuf Qardhawi, (Jakarta: Salma Pustaka, 2004), h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Konsep Husein Muhammad

a. Pengertian Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah mempunyai pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang berhak menentukan adalah ayah atau kakeknya. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan nikah paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār*. Hak *ijbār* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.⁸²

Husein Muhammad berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah orang yang mempunyai kekuasaan atas hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggungjawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁸³

Orang yang berhak menjadi wali *mujbir* dalam permasalahan ini adalah dapat dilakukan siapa saja, baik seorang ayah, ibu ataupun orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain.⁸⁴

⁸²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 104.

⁸³*Ibid*

⁸⁴Husein Muhammad,, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"*.(Yogyakarta: Lkis, 2001), h.111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Obyek Wali *Mujbir*

Dalam hal ini yang dimaksud menikahkan anaknya yang masih gadis atau perawan. Istilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam karena memiliki konotasi *ikrah dan taklif*. *Ikrah* yaitu suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap tubuhnya tanpa ia sendiri mampu untuk melawannya.⁸⁵ *Taklif* adalah suatu paksaan terhadap sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimanya atas suatu keyakinan.⁸⁶ Sehingga pilihan atau jodoh itu menjadi “tradisi” dalam pernikahan anak perempuannya.⁸⁷

Dari segi akibat hukum, *ikrah atau taklif* memiliki perbedaan yang tajam. Memaksa orang lain untuk melakukan secara *ikrah* dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika perbuatan yang dipaksakan tersebut dilaksanakan maka ia dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, memaksa orang lain untuk mengerjakan sesuatu secara *taklif*, justru merupakan pahala karena termasuk dalam katagori *amar ma'rûf nahi munkar*, atau bahasa yang lebih umum adalah pemaksaan tersebut dipandang dalam rangka penegakan hukum. Penolakan atas paksaan ini merupakan pelanggaran hukum, pelakunya berdosa atau harus dihukum.

⁸⁵Husein Muhammad,, *Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”*.(Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 78-80

⁸⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr 1409 H/1989 M), h. 6691.

⁸⁷*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat-Syarat Wali *Mujbir*

Pandangan Husein Muhammad tentang kriteria dengan persyaratan tertentu. Syarat wali mujbir menurut Husein Muhammad adalah mengikuti *madzhab* Syāfi'i dikaitkan dengan beberapa syarat-syarat yaitu:

- 1) Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya
- 2) Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan ayahnya.
- 3) Calon suami haruslah orang yang *kufu'* (setara atau sebanding)
- 4) Maskawin (mahar) harus tidak kurang dari mahar *mitsil*, yakni maskawin perempuan lain yang setara dan,
- 5) Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang menyakiti hati perempuan itu.⁸⁸

Menentukan pilihan jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi asas/dasar dalam setiap akad (termasuk akad nikah). Sekaligus menunjukkan bahwa dalam masalah perkawinan unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahannya.⁸⁹

7. Syarat-syarat wali *mujbir* dan *ghairumujbir*

Syarat-syarat wali *mujbir* sebagai berikut:⁹⁰ a) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon

⁸⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan*), (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 46-47.

⁸⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut:), h. 6567.

⁹⁰Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantin wanita), b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Syarat-syarat wali yang *ghairu mujbir* sebagai berikut:⁹¹ a) Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas, b) Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah *baligh*, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, c) Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan, d) Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan melihat diamnya.

1) Orang yang boleh dipaksa wali *mujbir*

Adapun orang yang boleh dipaksa oleh wali *al-mujbir* adalah sebagai berikut:⁹²

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila.

Dalam beberapa hal, kalangan ulama fikih berbeda pendapat. Jumhur ulama, selain ulama *Madzhab Syfi'i*, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum *baligh*, baik laki-laki atau perempuan, janda atau perawan, dan orang gila, boleh dipaksa menikah. Akan tetapi, ulama *Madzhab Syafi'i* mengemukakan satu dari hal di atas, yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi itu tidak boleh dipaksa kawin.

⁹¹*Ibid*, h. 101.

⁹²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4. h. 1337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal.

Menurut jumhur ulama, selain ulama *Madzhab* Hanafi wali tersebut juga termasuk wewenang wali *al-mujbir*. Mereka sepakat mengatakan bahwa *'illatnya* adalah masih perawan. Ulama *Madzhab* Hanafi tidak sepakat dengan jumhur ulama. Menurut mereka *'illatnya* adalah masih kecil.

- c. Wanita yang telah kehilangan perawannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.⁹³

Ulama *Madzhab* Māliki menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali *al-mujbir*. Menurut mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai *al-bikr* (belum menikah). Berbeda dengan jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang telah kehilangan perawannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang tidak bersuami lagi. Menurut *Madzhab* Syāfi'i menetapkan wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina atau (walaupun dengan benda lain) hukumnya sama seperti janda.⁹⁴

8. Orang Yang Berhak Menjadi Wali *Mujbir*

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan tertib dan urutan wali nikah, baik yang menyangkut wali *mujbir* maupun wali *al-mukhtar*.⁹⁵

⁹³ Abdul Ghafur Ansori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 40.

⁹⁴ Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 85.

⁹⁵ Abdul Ghani, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 70-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Madzhab* Hanafi

Tata tertib dan urutan wali *mujbir* adalah sebagai berikut: a) Anak laki-laki sampai ke bawah, b) Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, c) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah, d) Paman (saudara ayah) kandung, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah. Wali *al-mukhtar* urutan wali adalah anggota keluarga yang terdekat. Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.⁹⁶

2) *Madzhab* Maliki

Menurut *mdzhab* Maliki Urutan wali *mijbir* adalah sebagai berikut adalah ada tiga orang. a) Pemilik hamba sahaya terhadap hambanya, b) Ayah, baik cerdas maupun tidak, c) Orang yang diberi wasiat oleh ayah apabila ayah tidak ada, dengan syarat: ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilih suami anaknya, maharnya tidak boleh lebih rendah dari *al-mahar al-mitsil*, dan suami yang dipilihkan itu bukan orang yang fasik.⁹⁷

3) *Madzhab* Syāfi'i

Tata tertib dan urutan wali *mujbiral-ijbār* sebagai berikut: ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, kemudian pemilik hamba sahaya.

⁹⁶*Ibid*, h. 133.

⁹⁷*Ibid*,h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali *al-mukhtar* urutan wali adalah ayah, kakek dan seluruh kerabat paling dekat.⁹⁸

4) *Madzhab* Hanbali

Tata tertib dan urutan wali *al-ijbār* adalah sebagai berikut ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, anak laki-laki sampai ke bawah, saudara laki-laki seayah, paman, kemudian anak laki-laki paman dan paman ayah. Wali *al-mukhtar* urutan wali adalah seluruh kerabat yang menjadi '*ashabah*', dengan prioritas yang paling dekat. Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.

Sedangkan wali yang bukan *mujbir* adalah wali sukarela atau wali nasab biasa. Karena wali nasab biasa tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah dan seterusnya yang anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.⁹⁹

C Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

Lahirnya sebuah pemikiran tidak lepas dari adanya proses saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya yang telah ada, sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak akan pernah mencapai satu titik final. Oleh karena itu, menjadi tugas para pemikir untuk berinteraksi dengan tradisi dan budaya yang mengitarinya, baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul

⁹⁸ *Ibid*, h. 144.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut; Dār al-Fikr, 1990), h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakangan, sehingga mampu mengemas kembali. Melahirkan suatu teori baru atau bahkan meruntuhkan teori lama sesuai dengan paradigma yang berkembang.

Maqasid al-Syari'ah adalah jamak dari maksud yang berasal dari *fi'il qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqasid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁰⁰ Sedangkan Syari'at berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber keadilan¹⁰¹ dan jalan menuju sumber kehidupan.¹⁰² menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya "*Membumikan Syari'at Islam*" dengan mengutip dari "*Mu'jam al-Fadz al-Quran al-Karim*" menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al-Syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *Syir'ah* dan *Syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.¹⁰³

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqasid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqasid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-

¹⁰⁰ Ahmad Qarib, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170.

¹⁰¹ Ibn Mansur, *Lisan al-Arabi*, Jilid VIII, (Beirut: Dār al-Sadr, t.t), h. 175.

¹⁰² Fazlur Rahman, *islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

¹⁰³ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung, Pustaka Mizan, 2003), Cet Ke-I, h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padanan maknanya. al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi dan al-Hajib mendefenisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.

Sedangkan menurut Imam al-Syatibi, *Maqasid al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah S.W.T. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum Allah mengandung *Maqasid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia seperti yang terdapat dalam kitab *Muwaffaqat* Juz II yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا مَعًا

Artinya; *Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*

Maqasid al-Syari'ah ialah tujuan *al-Syari'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bila kita teliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyari'atan.¹⁰⁴ Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Surat al-Anbiya ayat 107:

¹⁰⁴Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiyā': 107)¹⁰⁵

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut:

وَالْمَصْدُّ الْعَامُّ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكِفَالَةِ ضَرُورِيٍّ وَتَوْفِيرِ حَاجِيٍّ وَتَحْسِينِيٍّ تَهْمٌ.¹⁰⁶

Artinya: Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyyah (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier)".

Begitu juga menurut Izzudin Ibn as-Salam, bahwa tujuan syariat adalah:

وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ أَمَا تَدْرًا مَفَاسِدُ أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحُ¹⁰⁷

Artinya: Semua aturan syariat itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebaikan)'.¹⁰⁷

Oleh karena itu, Izzudin membahas secara khusus dalam bukunya tentang tujuan syariat di atas, yaitu mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta mencegah bahaya di dunia dan di akhirat.

(جَلْبُ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ وَدَرْءُ مَفَاسِدِهِمَا)

Secara terminologi *maqasid al-syari'ah* adalah hukum-hukum islam yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 264.

¹⁰⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1987), h. 197.

¹⁰⁷ Izzudin Ibn Abdi Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Cairo: al-Isqamat, t.t), h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.¹⁰⁸ Sedangkan secara leksikal, *maqasid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasannya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *'ilat* ditetapkannya suatu hukum. Para ulama menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu bagian penting dalam kajian Usul fiqh.

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi obyek utama dalam bidang filsafat hukum Islam.¹⁰⁹

Kajian terhadap *maqasid al-syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*. Dalam melakukan *ijtihad*, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqasid al-syari'ah*, tanpa adanya itu seseorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan *syara'* jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para *mujtahid* perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terdapat suatu kasus tertentu atau kerana adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan dikatakan, pengetahuan

¹⁰⁸ Khazin Siraj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII, 1981), h. 2.

¹⁰⁹ Ali Mutaqin, *Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, (STAI Nurul Iman), (Bogor, 2017), h. 550.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai *maqasid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihad*. Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, terlebih dahulu perlu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, bahwa dalam menerapkan *nash* terhadap suatu kasus baru, kandungan *nash* harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan pensyari'atan hukum tersebut.

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam).

D. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syari'at Islam

Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.

Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَلَا عُدْوَنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah: 193)¹¹⁰

Ayat di atas dapat diketahui tujuan disyari'atkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Contoh lain, misalnya tujuan disyari'atkannya qishash adalah untuk menjaga kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. al-Baqarah: 179)¹¹¹

Contoh lain, yaitu Allah melarang minuman khamar dan berjudi dalam surah Al-Maidah: 90, dan dijelaskan tujuannya dalam surah Al-Maidah: 91

Dalam ayat 91 surat al-Maidah menjelaskan alasan dilarangnya minum khamar dan berjudi, yaitu dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta

¹¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h.

¹¹¹*Ibid*, h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghalangi dalam mengingat Allah dan Shalat. Memang ada beberapa perintah Allah yang alasannya oleh akal, seperti perintah melakukan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari. Namun tidaklah berarti perintah Allah itu tanpa tujuan, hanya saja tujuannya belum dapat dicapai oleh akal manusia, karena tidak dijelaskan oleh al-Qur'an, maupun hadis.

E: Tingkatan Masalah

1. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syari'ah*

al-Juwaini, guru al-Ghazali, mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang pertama kali mengajukan teori *maqasid al-syari'ah* ini. Ia dengan tegas menyatakan seseorang belum bisa dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dikutip dari Hasbi Umar dalam bukunya "*Nalar Fiqih Kontemporer*", al-Juwaini menulis satu bab khusus mengenai pembagian *'illat* dan prinsip-prinsip syari'ah (*al-Ushul*). Di sana ia menguraikan dengan baik gagasan tentang teori *maqasid al-syari'ah* dan kaitannya dengan pembahasan *'illat*.

Menurutnya *maqasid al-syari'ah* mempunyai lima tingkatan, yang sekaligus merupakan bentuk jenis-jenisnya, yakni *daruriyyat*, *al-hajat al-'ammat*, *makramat*, sesuatu yang tidak termasuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.¹¹²

Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan *maqashid al-syari'ah* menjadi

¹¹²Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta; Gedung Persada Press, 2007), h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga jenis, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *makramat*. Yang disebutkan terakhir ini dikenal juga dengan istilah *tahsiniyyat*.

Hasbi Umar menurut bukunya kemudian teori al-Juwaini ini diikuti oleh al-Ghazali. Dalam kitabnya *Syifa al-Ghalil*, al-Ghazali menjelaskan maksud syari'at dalam hubungannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyyat* dalam *qiyas*.¹¹³ Dua abad setelah beliau, al-Syatibi mengajukan gagasan senada tanpa modifikasi berarti. Dalam kitabnya *al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan utama Allah swt mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum mestilah bermuara pada tujuan hukum tersebut. Selanjutnya, ia mengklarifikasikan *masalah* kepada tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Klarifikasi di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat urgensinya manakala terjadi kontradiksi kemaslahatan antar peringkat tersebut. Dalam hal ini, peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian peringkat *tahsiniyyat*. Dalam arti lain, bahwa peringkat ketiga menyempurnakan peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.¹¹⁴

Memelihara kelompok *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia.

¹¹³*Ibid*, h. 123.

¹¹⁴*Ibid*, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan yang essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut.¹¹⁵ Jika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Artinya, kebutuhan dalam kelompok ketiga ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apabila mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peringkat *maqashid al-syari'ah* ini, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹¹⁵*Ibid*, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan, yaitu:

a) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. al-‘Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *Maqasid* kebutuhan dengan istilah “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”. al-Juwaini mengembangkan “teori hukum pidana” (*mazajir*) versi al-‘Amiri menjadi “teori penjagaan” (*ismab*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah “*hifzh al-furuj*” yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu Hamid al-Gazali yang membuat istilah *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) sebagai *Maqasid* hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh al-Syatibi.

Pada abad ke XX (dua puluh) Masehi para penulis *Maqasid* secara signifikan mengembangkan “memelihara keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn ‘Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai *Maqasid* hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya, *Ushul al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Kontribusi Ibn ‘Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *Maqasid* dalam berbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (*muzajjir*) versi al-Amiri maupun konsep memelihara (*hifzh*) versi al-Gazali, melainkan konsep “nilai dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem” menurut terminologi Ibn Asyur. Tetapi, beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide memasukkan konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan ke dalam *Maqashid*. Seperti Syaikh Ali Jum’ah (Mufti Mesir) lebih senang menyatakan bahwa konsep-konsep tersebut secara implisit telah tercakup dalam teori klasik.¹¹⁶

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari’atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsil*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari’atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika

¹¹⁶Syahrul Sidik, “*Maqasid Syari’ah dan Tantangan Modernitas*, Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 154-155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.¹¹⁷

Adapun berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing yang meliputi selain *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta akan di jelaskan secara singkat. Yaitu sebagai berikut :

b) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti pensyari'atan shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang berpergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.

¹¹⁷Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Op. Cit, h. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Pelaksanaan ketentuan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia. Jika ia tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.¹¹⁸

c) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan

¹¹⁸*Ibid*, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

d) Memelihara Akal (*Hifzh al- 'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti diharamkan mengonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

e) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyyat* seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang illegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat* seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.¹¹⁹

Mengetahui urutan peringkat *maslahat* seperti di atas adalah penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan pertama (*daruriyyat*) harus didahulukan daripada tingkatan kedua, *hajiyyat*, dan tingkatan ketiga, *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang halal. Jika pada

¹¹⁹*Ibid*, h. 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan mengonsumsi makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyat*; sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara nyawa dalam tingkatan *hajiyyat*. Jadi, memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* harus lebih didahulukan daripada tingkatan *hajiyyat*. Begitulah seterusnya jika terjadi pertentangan dalam penerapan tingkatan maslahat, maka prioritaskan sesuai dengan urutannya.

Selanjutnya, ‘Izzu al-Din ibn Abd al-Salam adalah seorang ahli *Ushul fiqh* yang membahas secara khusus aspek utama *maqasid al-syari’ah*. Dalam kitabnya, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, ia lebih banyak menguraikan hakikat *maslahah*, yang diekspresikan dalam bentuk *dar’u al-mafasid wa jalbu al-manafi*”, menghindari mafsadat dan menarik manfaat.¹²⁰ Baginya *maslahah duniyawiyyat* tidak dapat terlepas dari tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tatimmat* atau *takmilat*. Selanjutnya ia menambahkan bahwa setiap *taklif* bermuara pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat.

Dari keterangan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengembangan teori hirarkis *maqasid al-syari’ah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

¹²⁰Izzu al-Din Ibn al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Cairo: al-Istiqamat. t. 2), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tingkatan *daruriyyat*; yaitu *maqasid al-syari'ah* yang pasti diperlukan dan tidak dapat dielakkan. Tanpa *maqasid al-syari'ah* kemaslahatan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya, objektif menjaga nyawa (*hifzh Al-nafs*) daripada bahaya dan kematian. Objektif ini adalah peringkat yang tertinggi dan mesti dilaksanakan. Mengelak daripada kematian adalah kewajiban. Oleh karena itu seseorang dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan demi melindungi nyawanya dari kematian.
- 2) Tingkatan *hajiyyat*. Maksudnya bahwa perbuatan tersebut diperlukan untuk menghilangkan kesempitan dan menghindarkan seseorang dari kewajiban yang sangat memberatkan. Andaikata tidak diatasi maka seseorang itu akan menanggung beban yang sangat berat (*masyaqqah*). Namun begitu, ketiadaan *maqasid al-syari'ah* di sini tidak sampai mengganggu kemaslahatan umum, juga tidak akan membawa kepada kerusakan seperti yang berlaku pada tingkatan *daruriyyat*. Sebagai contoh, memberikan dispensasi shalat jama' dan *qashar* bagi seorang musafir yang memenuhi syarat; boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan menggantinya setelah ia sembuh.
- 3) Tingkatan *tahsiniyyat*, maksudnya melaksanakan adat kebiasaan yang baik dan menjauhi hal-hal yang dapat diterima oleh akal sehat. Ini seperti menutup aurat, bersedekah, mengerjakan amal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebajikan, dan berbakti kepada masyarakat. Pola peringkat *maqasid al-syari'ah* ini, sampai saat ini masih dipertahankan dan tidak banyak mengalami perubahan, termasuk dalam berbagai studi modern.¹²¹

2. Kehujjahan *Maqasid al-Syari'ah*

Sifat dasar dari *maqashid al-Syari'ah* adalah pasti (*qath'i*). Kepastian di sini merujuk pada otoritas *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Apabila syari'ah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosio-ekonomi, terutama bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi *maqashid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum Syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.

al-Ghazali mengajukan teori *maqashid al-syari'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa *maslahah* adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,

¹²¹Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyat*, (Herndon, 1991), h. 65-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harta. Artinya, kelima unsur diatas dianggap suci, mulia, dan dihormati, yang mesti dilindungi dan dipertahankan. *Maqasid al-syari'ah* juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*) yang pasti.¹²² Ia bukan saja disarikan dari elemen hukum-hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil, tapi lebih dari itu, ia merupakan makna terdalam, intisari semua hukum, dalil-dalil dan isi kandungan al-Qur'an dan al-Sunnah.¹²³ Kesimpulan seperti ini kelihatan dapat diterima secara meyakinkan. Apakah ide tersebut diajukan pada abad kelima, di era asas-asas syari'ah, terutama al-Sunnah, telah tercatat dengan baik. Sehingga hampir tidak mungkin ada al-Sunnah yang tercecce. Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima *maqashid* di atas. Namun, kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting *maqashid al-syari'ah*

Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua corak metode: Pertama, metode konstruktif (bersifat membangun) dan kedua, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktivitas sunnat yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh bagi metode ini. Hukum wajib dan sunnat tentu dimaksudkan demi memelihara sekaligus mengukuhkan elemen *maqashid al-syari'ah* di atas. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan sebagai contoh metode preventif, yakni untuk mencegah berbagai anasir

¹²² Al-Ghazali, *Mustasfa*, (), h. 303.

¹²³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat mengancam bahkan mengeliminir semua elemen *maqasid al-syari'ah*. Dalam pada itu, *maqasid al-syari'ah* juga telah didukung undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum yang tegas. Sebagai contoh, apabila elemen jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiayaan, maka hal itu merupakan tindakan pidana yang harus dijatuhi hukuman. Demikian juga apabila kehormatan dinodai, misalnya berdua-duaan di tempat sepi atau melakukan perzinahan, maka si pelakunya dianggap sebagai pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Kedua metode tersebut diuraikan al-Ghazali di dalam kitabnya *al-Mustasfa*.¹²⁴

al-Syatibi melanjutkan uraian tersebut dengan mengemukakan format konseptualnya. Menurutnya, *maqasid al-syari'ah* berorientasi mengeluarkan seorang *mukallaf* dari lingkaran hawa nafsunya sehingga ia dapat menjadi hamba Allah swt secara suka rela.¹²⁵ Di bagian lain ia menyatakan, bahwa semua kewajiban yang diperintahkan oleh syari'ah kembali kepada pemeliharaan terhadap *maqasid al-syari'ah*. *Maqasid al-syari'ah* juga bersifat *qath'i*, artinya ia menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan dunia. Jika ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan dapat dicapai dengan baik. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan istilah *qaht'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyya-t al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu ia menjadi suatu hal yang penting dalam penetapan hukum. Pandangan al-Syatibi ini juga menegaskan adanya keterpaduan antara wahyu dan pengalaman manusia dalam teori *maqasid al-syari'ah*.

¹²⁴ Al-Ghazali, *Mustasfa*, Op. Cit, h. 267.

¹²⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Op. Cit, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Format konseptual ini juga terlihat dalam ciri fleksibilitas pelaksanaan hukum syari'ah. Yusuf al-Qardhawi berhasil mengembangkan teori kelenturan syari'ah itu dengan baik. Sebagai contoh, persoalan bentuk sistem politik, di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak dijelaskan secara terperinci dan pasti. Begitu pula soal penyelenggaraan mekanisme politik dan kekuasaan, seperti mengadakan pemilihan umum, membuat konstitusi, legislasi undang-undang, wakil rakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan lainnya, tidak ditegaskan dalam secara terperinci. Sebaliknya, penentuan sistem lembaga politik dan negara tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan ummat. Syari'ah hanya memberikan petunjuk yang bersifat umum dan fleksibel. Dalam al-Qur'an antara lain disebutkan "Dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka" dan "jika kamu sekalian menetapkan hukum di antara orang-orang maka tetapkanlah hukum di kalangan mereka dengan adil", dan ayat-ayat lain yang senada dengan itu.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa hukum tidak seluruhnya dikemas dalam format yang terbatas dan baku. Tetapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan hukum dalam rangka *maqasid al-syari'ah* tersebut. Dalam kaitan inilah para ulama selalu dituntut untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran fiqh, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap zaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WALI MUJBIR

Dalam kamus *al-Munawwir*, kata *madzhab* secara bahasa memiliki pengertian yakni: *madzhab* berasal dari kata مذهب jamaknya مذاهب yang berarti yang diikuti/dijadikan pedoman atau metode.¹ Sedangkan menurut istilah adalah segala hukum yang mengandung berbagai masalah baik dilihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya pada pedoman hidup.²

Madzhab dapat dipahami sebagai aliran pemikiran dibidang fiqh yang dalam proses perjalanannya menjadi sebuah komunitas dalam masyarakat Islam diberbagai aspek agama. Secara umum, proses lahirnya *madzhab* yang paling utama adalah faktor usaha pada murid Imam *madzhab* yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para Imam kepada masyarakat dan juga disebabkan pembukuan pendapat Imam *madzhab* sehingga memudahkan tersebarnya pendapat dikalangan masyarakat. Lahirnya *madzhab* menyebabkan adanya suatu *ikhtilāf* diantara para ulama, secara mendasar faktor perbedaan itu ada dua yakni: pertama kemungkinan yang terkandung dalam *nash-nash* al-Qur'an dan hadis dan kedua perbedaan pemahaman ulama.³

¹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 453.

²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 27.

³Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya perbedaan pemahaman ulama tersebut, maka berpengaruh pada pendapat Imam Hanafi yang berkenaan dengan wali *mujbir* dalam pernikahan, sehingga dalam bab ini menjadi penting dibahas mengenai *madzhab* tersebut.

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Pendiri *madzhab* Hanafi ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Dilahirkan pada masa sahabat, Imam Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M.⁴ Beliau ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup didua masa kekhilafahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir khalifah Bani Umayyah dan awal masa khilafah Abbasiyah.

Imam Abu Hanifah memang lebih dikenal sebagai *faqih* (ahli hukum) dari pada *muhaddis* (ahli hadis). Keahliannya dalam bidang fikih telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para imam sendiri seperti Imam Mālik dan Imam Syāfi'i. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang hadis karena maha gurunya seperti Atha', Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah mengajarkan hadis kepadanya selain fiqih.⁵

Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata Bapak (Abu/Ayah), sehingga lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.⁶

⁴Muchlis M. Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Lentera Hati, Jild I, 2013), h. 2.

⁵M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 188-189.

⁶Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Isinbath Para Fuqaha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata Hanifah dalam bahasa berarti tinta. Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun pribadinya, sebab kata *hanif* dalam bahasa Arab juga berarti condong kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak menjabat sebagai *qadhi*, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.⁷

Dalam studinya, pada awalnya Imam Abu Hanifah senang sekali belajar bidang *Qira'ah* dan *tajwid* kepada Idris Asham, *al-hadis*, *nahwu*, *sharaf*, *sastra*, *syar'ir* dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu *kalam* (theologi). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat argumentasi yang dapat menyerang kelompok *Khawarij* dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh *theologi* Islam.⁸

Pada Abad ke 2 hijriyyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu fikih di Irak pada madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asya'ry, murid dari Aqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhair al-Tabi'i, kemudian kepemimpinan madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada

⁷*Ibid*, h. 129-130.

⁸Mansur Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para fuqaha dari kalangan *tabi'in*, seperti Atha bin Rabah dan Nafi' Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar fiqh dan hadis.

Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kufah, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami fikih dan hadis dan tempat ini pulalah beliau dapat berteman dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu fiqh dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary tahun 130 H), majlis madrasah Kufah bersepakat untuk mengangkat beliau Abu Hanifah sebagai kepala madrasah dan selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan *fatwa-fatwanya* dalam bidang fiqh.

Kemudian *fatwa-fatwa* itulah yang menjadi dasar pemikiran *Madzhab* Hanafi sampai sekarang. Keberhasilan beliau ini pada hakikatnya terdorong oleh nasehat para guru setianya, diantaranya adalah Imam Amir Ibn Syahrial Sya'by dan Hammad Ibn Sulaiman al-Asy'ary.⁹

Di samping itu semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok Ulama yang sangat cerdas dalam keilmuan keagamaannya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'* dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya. Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-

⁹Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1999), h. 94-95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam *al-Adzam* dan kekuasaan ilmunya itu diakui oleh Imam Syāfi'i, beliau berkata: manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah.

Tampaknya ilmu Abu Hanifah bukan hanya bidang Hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk *tasawuf*. Kehidupan Imam Abu Hanifah di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Imam Abu Hanifah sudah menjelang dewasa. Untuk menjamin ekonominya, ia dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang ia dikenal jujur dan lugas, kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini. Bakat dagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutera asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.¹⁰

Imam Abu Hanifah dibesarkan di Kufah, setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika beliau lahir. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Abu a-Thufail, Amir bin Wailah di Mekkah, bahkan ada yang mengatakan beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekkah. Kalau ini benar maka Imam Abu Hanifah merupakan seorang Tabi'in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi Tabi'it-tabi'in, maka tidak tepat dia disebut

¹⁰M. Fauzi Arifin, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Madzhab Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2001), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabi'in. Seperti halnya ulama lain, Imam Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan *fiqh al-Kabir*) dan ilmu *fiqh*. Dari segi lokasi di mana ia dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah adalah pemikiran rasional.¹¹

Dari keberhasilan Imam Abu Hanifah dalam mendidik ratusan murid yang memiliki wawasan luas dalam bidang *fiqh*, maka wajar jika sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yang memanang cukup banyak. Murid-murid Abū Hanīfah antara lain:¹² Abū Yusuf Ya'qūb bin Ibrāhīm al-Ansārī (113-183 H), Zufar bin Hudhail bin Qāyis al-Kūfī (110-157 H), Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaybānī (132-179 H), Hasan bin Ziyad al-Lu'lu al-Kūfī Mawlā al-Ansārī (w. 204 H).

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang menundukan kepuncak ilmu dan dianatara para ulama. Beliau mempunyai sifat yang sama dengan sifat-sifat yang harus ada pada seseorang *alim al-alamah* yaitu sifatnya adalah:

- a. Abu Hanifah memiliki perawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, kulitnya kecoklat-coklatan, memiliki postur tubuh yang bagus, suaranya bagus dan enak didengar.
- b. Seorang yang teguh pendiriannya, yang tidak dapat diombang ambing pengaruh-pengaruh luar.
- c. Berani mengatakan salah pada yang salah, walau yang disalahkan itu seorang yang berpengaruh besar, dengan kata lain konsekwensi hukum.
- d. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain.

¹¹Muh Zuhri, *Op. Cit*, h. 95.

¹²Hudhari Bik, *Terjemah Tarikh al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)* (Darul Ikhyia Indonesia, 1980), h. 413.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Suka meneliti segala yang dihadapi, tak berhenti pada dasarnya saja tetapi terus mendalami isinya, karena beliau selalu mencari *illat-illat* hukumnya.
 - f. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk memecahkan hujjah lawan.¹³
1. Pengalaman Abu Hanifah dalam Belajar

Pengaruh dan pengalaman yang dialami oleh Imam Abu Hanifah memberi kesan dalam perkembangan ilmu dan pengaruhnya pada perluasan fikiran. Kehidupan Imam Abu Hanifah dan pengalaman-pengalamannya menuju pada pembukaan fiqh Iraq, yaitu fiqh yang disesuaikan, kondisi, dan kebudayaan di Negeri Iraq.

Salah satu pengalamannya juga, Abu Hanifah banyak melawat, kurang lebih lima puluh kali beliau berhaji. Dalam pelawatannya sering berjumpa dengan Imam Malik di Madinah dan menjumpai al-Auza'i, dan berdiskusi dengan mereka.¹⁴

Dalam pengalamannya, Imam Abu Hanifah pernah ditunjuk oleh Imam Hubairah (salah satu wali Iraq) untuk menjadi hakim pada masa itu, namun tawaran yang diberikan oleh Hubairah ditolaknya, sehingga Imam Abu Hanifah dipenjara dan disiksa.¹⁵ Tawaran semacam itu pula dialami oleh Imam Abu Hanifah pada masa Abbasiyah, namun sama tawaran itu ditolaknya, sehingga Abu Hanifah dipenjara sampai meninggal pada tahun 150 H/767 M.

¹³Hasbi Asy-Shidieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Cet. Ke-I, (semarang: PT. Pustaka Karya Putra, 1997), h. 448.

¹⁴*Ibid*, h. 450.

¹⁵Hudhori Bik, *Op. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada yang mengartikan bahwa penolakan itu menurut kabar yang tersiar dari Imam Abu Hanifah sendiri, ialah karena ketidaksetujuan dengan politik yang dilakukan oleh penguasa negara pada waktu itu. Akan tetapi ada pula yang mengatakan kepercayaan beliau seperti sementara orang lain juga, bahwa pemangkuan jabatan dalam pemerintahan akan mendorong pada kecacatan dan akan merugikan agama dan kehormatan.¹⁶

2. Imam Abu Hanifah di bidang Politik, Sosial dan Kebudayaan

a. Politik

Imam Abu Hanifah mengalami masa kejayaan Bani Umayyah, dan masa kejatuhannya. Beliau hidup dalam masa pertumbuhan cita-cita Abbasiyah yang mula-mula tumbuh di tengah-tengah pengawasan ketat mata-mata bani Umayyah. Imam Abu Hanifah mengalami semua itu dan terpengaruh jiwanya.

Imam Abu Hanifah cenderung pada keturunan Ali dan Fatimah. Pada masa itu Imam Abu Hanifah tidak ke medan pertempuran secara fisik, ia mencukupinya dengan *ifta* dan sebagainya. Abu Hanifah juga tetap menempatkan Abu Bakr dan Umar di tempat teratas, namun Abu Hanifah tidak mendahulukan Utsman atas Ali, walaupun tidak mencela Ustman.¹⁷

Ketika Yazid bin Umar Ibnu Hubairah menjadi gubernur Iraq, dia meminta Abu Hanifah mengendalikan pengadilan, atau menjadi bendaharawan negara, penawaran itu hanya untuk menguji sampai

¹⁶Subhi Mahmasni, *Filsafat Tasyri Fil Islam*, alih bahasa, Ahmad Sudjono, Cet. Ke-I, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976), h. 456.

¹⁷Hasbi Asy-Shidieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Op. Cit*, h. 456.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana partisipasi Imam Abu Hanifah kepada pemerintah Bani Umayyah. Abu Hanifah menolak demikian pula al-Mansyur menyuruh Abu Hanifah jadi hakim, ia tetap menolak. Kemudian Imam Abu Hanifah dapat meloloskan diri dari penjara dengan pertolongan tukang cambuknya. Ia melarikan diri ke Mekkah pada tahun 130 H dan bermukim di sana. Barulah pada tahun 136 H di masa al-Mansyur, Imam Abu Hanifah kembali ke Kufah.¹⁸

Pada mulanya Imam Abu Hanifah menghadapi Bani Abbas penuh dengan kegembiraan, beliau sangat simpati terhadap pemerintahan Bani Abbas, karena pemerintahan ini dibangun berdasarkan kepada wasiat salah seorang cucu Ali bin Abi Thalib, namun setelah adanya persengkataan antara khalifah-khalifah Bani Abbas. Imam Abu Hanifah mengkritik khalifah Abbasiyah terhadap tindakan-tindakan mereka terhadap keturunan Ali.

Abu Hanifah juga mengkritik keras putusan-putusan hakim dan fatwa-fatwa ulama pemerintah. Karena itu Abu Hanifah di penjara dan di cambuk, akhirnya Abu Hanifah wafat sebagai akibat dari penderitaan-penderitaan dalam tahanan rumah.¹⁹

b. Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat Imam Abu Hanifah terkenal dengan sabar dan pemaaf. Selama itu juga beliau memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Walid bin Qasim berkata: Abu Hanifah adalah

¹⁸*Ibid*, h. 445.

¹⁹*Ibid*, h. 445-446.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap para sahabatnya selalu bertanya kondisi mereka, ketika beliau mengetahui ada diantara mereka yang mempunyai kebutuhan, maka beliau selalu memberikan bantuan. Kalau ada sanak saudara mereka yang sakit maka beliau membesuknya, kalau ada diantara mereka atau sanak saudara mereka yang meninggal maka beliau selalu mengiringi jenazahnya. Beliau selalu memberikan bantuan pada para sahabatnya atau sanak saudaranya yang ditimpa musibah, beliau memiliki watak pemurah dan tidak ada seorangpun yang mengutarakan kebutuhannya yang tidak dipenuhi oleh beliau.

Beliau mempunyai tetangga kafir dan pemabuk, yang selalu begadang dan selalu berteriak-teriak ketika kena musibah. Paada suatu saat ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Seiring dengan Abu Hanifah mengetahuinya lalu beliau mendatangi hakim dan guna untuk melepaskan pemuda itu dari penjara. Tak lama kemudian pemuda itu dibebaskan.

Abu Hanifah mengeluarkan 10 dinar dan mengeluarkannya pada pemuda itu. Seraya berkata: “cukuplah dengan ini, kekurangan pemasukanmu di waktu berada dalam penjara, kalau dalam suatu hari nanti kamu butuh sesuatu, sampaikanlah padaku. Jangan sampai ada jarak antara kamu dengan kami dan bergabunglah bersama istrimu untuk membahagiakannya atas kedatanganmu.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kebudayaan

Kejeniusan daya intelektual yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah mampu menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau memiliki kelebihan di bidang teori, analogi dan logika sehingga beliau dikatakan tokoh *rasionalis*.

Dalam disiplin ilmu syari'at, bahasa, sastra serta filsafat, beliau bagaikan lautan yang tak terbendung dan tidak ada mengungguli, sehingga beliau mampu mengimbangi perkembangan budaya yang berkembang di Kufah. Pada waktu perkembangan budaya di Kufah berkembang sangat pesat dan Kufahpun menjadi pusat kebudayaan Islam.

Seiring dengan perkembangan budaya beliau memberikan kontribusi pemikiran dari segala bidang ilmu terutama ilmu ushul dan ilmu fiqh. Pemikiran yang dilahirkan oleh pemikiran Imam Abu Hanifah menimbulkan terbentuknya *Madzhab* Hanafi.

3. Pemikiran Fiqih Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang faqih yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Sebagaimana diceritakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa Abu Hanifah adalah seorang faqih dan ulama yang lebih banyak menggunakan *ra'yu*, atau setidaknya lebih cenderung rasional dalam pemikiran *ijtihadnya*.²⁰ Kecenderungan rasional dalam fiqihnya Imam Abu Hanifah banyak di pengaruhi *sosio-*

²⁰Ramli SA, *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kultural dan kebudayaan yang berkembang di Iraq, karena pada waktu itu Iraq sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu, sehingga banyak diskusi-diskusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama termasuk Imam Abu Hanifah.

Toha Jabir Riadl al-Ulwani, membagi pemikiran Imam Abu Hanifah menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pemikiran pokok (primer)

Sebagaimana pernyataan Imam Abu Hanifah sendiri:

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ فَمَا لَمْ أَجِدْ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَثَارُ فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مِنْ سُنَّةٍ لَأُخْرِجَ مِنْ قَوْلٍ غَيْرُهُمْ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الشَّاءِ بْنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدٍ ابْنِ عَلِيٍّ أَنْ اجْتَهِدْ كَمَا اجْتَهِدُوا

Artinya: Saya berpegang pada kitab Allah apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang pada sunah, saya berpegang pada atsar, jika saya tidak menemukan dalam kitab dan sunah saya berepegang pada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lain, saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada yang lainnya, maka jika persoalan sampai pada Ibrahim al-Sya'bani, al-Hasan, Ibnu Sirin, Sa'id Ibnu Musayyab, maka saya harus berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.²¹

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada sumber dalil yang *sistematika* namun dalam penggunaan *qiyas* sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan

²¹ *Ibid*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan *istihsan*.

4. Karya-karyanya Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah mempelajari fiqih dengan teori-teori kajiannya dari Hammad bin Abu Sulaiman salah seorang ulama fiqih dari aliran *rasionalis* di Kufah. Dia belajar dengan Hammad dalam tempo yang tidak kurang dari delapan belas tahun, sampai gurunya itu meninggal tahun 120 H. Namun sebagaimana Abu Zahra katakan, dia tidak mengkhususkan diri untuk belajar di seluruh waktunya. Sebagai pedagang pada waktu-waktu tertentu dia mengurus dagangannya, dan diwaktu-waktu lain dia belajar.²²

Akan tetapi pengalaman-pengalaman dia dari luar Kufah hanya sekedar memperkaya koleksi hadis-hadisnya, sementara *metodologi* kajian fiqihnya lebih mencerminkan aliran madrasah *ra'yu* yang dia pelajari dari Hammad, dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum kesatu dan kedua. kemudian kalau keduanya tidak secara tegas menyatakan ketentuan-ketentuan hukum persoalan yang sedang di kajinya, dia mempelajarinya dari perkataan sahabat, baik dalam bentuk *ijma'* maupun *fatwa*. Kalau ketiganya tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum persoalan-persoalannya itu dia mengkajinya dengan akal lewat *qiyas* dan *istihsan*, atau melihat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang ditaatinya secara bersama-sama.

²²Dede Rosadah, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kemampuannya merumuskan pedoman serta kaidah-kaidah dalam *ijtihad*-nya ini, Imam Abu Hanifah dinilai oleh para ulama fiqih sebagai seorang *mujtahid mustaqil*, yang mampu melakukan kajian-kajian fiqih secara mandiri, dan tercipta *madzhab* fiqih yang dinisbatkan pada dirinya. Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung.

Dalam sejarah tidak ditemukan satu kitapun dalam bidang fiqih yang telah diterbitkan atau ditulis oleh Imam Abu Hanifah sendiri, hal ini wajar karena dimasa Imam Abu Hanifah belum berkembang usaha pembukuan. Diwaktu usaha pembukuan telah mulai berkembang beliau telah berusia lanjut, murid-muridnya yang membukukan pendapatnya.

Salah satu murid terbesarnya adalah Muhammad Ibnu Hasan. Kitab-kitab yang diusahakan oleh Muhammad Ibnu Hasan ialah hasil catatan-catatannya dari Abu Yusuf dari Imam Abu Hanifah. Akan tetapi walaupun Imam Abu Hanifah tidak mempunyai kitab yang tidak dikatakan hasil karyanya sendiri, namun sebagian para ulama mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai *kitab musnad* yang mengandung hadis yang diriwayatkan olehnya.²³

Muhammad Ibnu Zahra menjelaskan, bahwa Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar*,

²³Hasbi as-Shidiqi, h. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Ashghar dan *al-'alim wa muta'allim*, *Risalah ila Utsman al-biti* (w. 132 H) *Risalah ar-Ra'du ala al-Qadariah*.²⁴

Masalah-masalah fiqih yang terdapat dalam *mazdhab* Hanafi dibedakan menjadi tiga:

1. *Al-Ushul*
2. *An-Nawadir* dan
3. *Al-Fatwa*

Al-Ushul, adalah masalah-masalah termasuk *dhahir* al-Riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, dan Zufar.

Muhammad Ibnu Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *dhahir al-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *dhahir Riwayah* ada enam buah yaitu:

- 1) *Al-Mabsuth* atau *Ashl*
- 2) *Al-Jami' al-Kabir*
- 3) *Al-Jami' al-Shaghir*
- 4) *Al-Atsar al-Kabir*
- 5) *Al-Atsar al-Shaghir*,
- 6) *Al-Ziyadat*

Dinamakan kitab *dhahir Riwayah* karena kitab ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dengan riwayat yang *tsiqah* dan mutawatir.

²⁴Jaih Mubaraq, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. Ke-III, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang keenam kitab ini pada masa permulaan abad ke-empat hijrah telah disusun dan di himpun menjadi satu oleh Abdul Fadhil Muhammad bin Ahmad al-Marzawi yang terkenal dengan nama al-Halim al-Syahid dalam satu kitab yang diberi syarah oleh Syam al-Dīn al-Syarkhasi dan dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.²⁵

An-Nawadir adalah kitab yang berisikan pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *dhahiri ar-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk an-Nawadir adalah:

- 1) *Al-Kaisaniyyat*
- 2) *Al-Ruqayyat*
- 3) *Al-Hanuriyyat*
- 4) *Al-Jurjaniyyat*

Murid-murid Abu Hanifah yang menyusun kitab fiqih, seperti Ala' ad-Dīn, Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) yang menyusun kitab *Bada'i ash-Shan'i* dan *fi tartib asy-Syara'i*

Al-Fatwa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti kitab an-Nawazi karya Abi al-Laits as-Samarkandi. Kitab-kitab Fatwa Hanafiah yang terkenal adalah:

- 1) *Al-Fatwa al-Khaniyyat* oleh Kadri Khan
- 2) *Al-Fatwa al-Hindiyyah*
- 3) *Al-Fatwa al-Khairiyyah*

²⁵Dedi Supriyadi, h. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Al-Fatwa al-Bazziyah*

5) *Al-Fatwa al-Hamidiyyah*²⁶

Kitab-kitab ushul al-Fiqih dalam aliran Hanafi adalah

- 1) *Ushul al-Fiqih* Abu Zaid ad-Duyusi (w. 430 H)
- 2) *Ushul al-Fiqih* karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi (w. 430 H)
- 3) *Al-Manar* karya an-Nasafi (w. 790 H) dan syarahnya *Misykat al-Anwar*

Selain kitab *fiqih* dan *ushul al-Fiqih*, ulama Hanafiah juga membangun kaidah-kaidah fiqih yang kemudian dalam suatu kitab tersendiri. Diantara kitab *qawaid al-Fiqih* aliran Hanafi adalah:

- 1) *Ushul al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H)
- 2) *Ta'sis an-Nazhar* karya Abu Zaid ad-Dabusi (w. 430 H)
- 3) *Al-Asybah wa an-Nadha'ir* karya Ibn Nujaim (w. 970 H)
- 4) *Majami' al-Haqa'iq* karya Ibn Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H)
- 5) *Majallah al-Ahkam al-'Addhiyyah* (turki utsmani, w. 1292 H)
- 6) *Al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawaid wa al-Fawa'id* karya Ibn Hamzah (w. 1305 H)
- 7) *Qawa'id al-Fiqih*, karya Mujaddidi.²⁷

5. Metode *Istinbāth* Hukum Abu Hanifah

Metode yang digunakan oleh Abū Hanīfah yaitu selalu merujuk pada al-Qur'an, kemudian jika tidak ditemukan dalil yang sesuai dengan masalah tersebut maka dia akan merujuk pada al-Hadis. Tentang sumber kedua hukum Islam ini, dia sangat berhati-hati dalam menerima suatu

²⁶*Ibid*, h. 228

²⁷*Ibid*, h. 229.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis, sebaliknya dia cukup longgar dalam penggunaan *qiyās* dan *istihsān*.²⁸ Hal ini disebabkan karena jauhnya Irak dengan tempat sumber hadis di Madinah. Secara umum dasar *madzhab* Hanafi terdiri dari:

a. Al-Qur'an

Madzhab Hanafi memposisikan al-Qur'an sebagai hukum Islam yang pertama tanpa perlu diperdebatkan lagi, pada dasarnya al-Qur'an digunakan sebagai akurasi sumber hukum yang lainnya, dalam artian apabila ada sumber yang bertentangan dengan al-Qur'an maka sumber hukum tersebut ditinggalkan.

Ulama *Madzhab* Hanafi berpandangan bahwa pesan al-Qur'an tidak semuanya *qath'i* dalalah. Ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh al-Qur'an tersebut, terutama ayat-ayat yang menerangkan mu'amalah umum manusia.

Dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan mu'amalah tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum suatu masalah lebih besar. Hal itu dibuktikan, baik oleh Imam Hanafi, maupun oleh murid-muridnya, dan karena ini juga *Madzhab* Hanafi dijuluki *madzhab* yang paling *umari* dan *madzhab* liberalis dan rasionalis.²⁹

Dalam memahami al-Qur'an, ulama *Madzhab* Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal*, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap *'amm* dan *khas* ayat al-

²⁸Yayan Sopyan, *Tārikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 121.

²⁹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Iraq yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang bermadzhab dengan mereka.

Menurut ulama Hanafiah, hukum *khas* mencapai yang *makhsus* adalah *qath'i* tanpa perlu adanya bayan, *khasasul* Qur'an, *qath'i* di dalamnya, dan segala nash yang mengubah hukumnya dipandang *nasikh*, dan *nasikh* harus sama kuatnya dari segala *tsubut*-nya. Pendapat ulama Hanafiah tersebut merupakan hasil *takhrij* dari hukum-hukum *furu'* yang ditetapkan oleh Abu Hanifah sendiri.

'*Ammul* Qur'an sama dengan *khas*, *qath'i* dalalahnya selama ia bukan *muawwal*. '*Ammul* Qur'an mempunyai dua sifat, *qath'iyyah* dan kedua *qath'iyyu al-Tsubut*. Oleh karena itu, hadis-hadis ahad tak dapat menentangnya. Hadis-hadis ahad meskipun di *khas*, *dhanni wurud*-nya.

Hal inilah yang menjadikan salah satu titik yang membedakan fuqaha *ra'yi* dan fuqaha hadis. Fuqaha *ra'yi* mengumumkan al-Qur'an, tidak mengkhususkan dengan hadis-hadis ahad. Fuqaha Hadis, sebagai mana yang dikemukakan oleh Syāfi'i dalam *ar-Risalah* dan *al-Umm*, mengkhususkan '*amm al-Qur'an* dengan hadis Ahad.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi '*amm* dan *khas*-nya juga harus ada usaha *bayan*, karena sifatnya *mujmal* atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan *tafsir*, *takwil*, atau sifat-sifatnya *mutlaq* memerlukan *taqyid*. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama Hanafiah berpendapat bahwa as-Sunnah bisa menjadi bayan bagi al-Qur'an.³⁰

Bayan al-Qur'an menurut Hanafi terbagi tiga bagian:

- a) *Bayan taqrir*, seperti sabda nabi, “*berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya*”
- b) *Bayan tafsir*, seperti hadis yang menerangkan kaifiat shalat, kaifiat haji, zakat, cara memotong tangan pencuri dan menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan riba.
- c) *Bayan tabdin* atau yang disebut juga *bayan naskh*, al-Qur'an boleh dinasakhkan dengan as-Sunnah dengan syarat bahwa as-Sunnah tersebut adalah mutawatir atau *masyhurah* dan *mustafidhah*.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.³¹

Dasar kedua yang digunakan oleh *mazdhab* Imam Hanafi adalah as-Sunnah. Martabat as-Sunnah terletak dibawah al-Qur'an Imam Abu Yusuf berkata, “aku belum pernah melihat seorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadis daripada Abu Hanifah. Ia adalah seorang

³⁰*Ibid*, h. 160.

³¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, cet. III (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h 188..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadis dan men-*tadil* dan men-*tarjih* hadis.³²

Tentang dasar yang kedua ini, *Madzhab* Hanafi sepakat mengamalkan as-Sunnah yang mutawatir, masyhur, dan shahih, hanya saja Imam Hanafi sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.

Abu Hanifah menerima hadis ahad, jika tidak berlawanan dengan *qiyas*, tapi jika berlawanan Hadis ahad dengan *qiyas* yang *illat*-nya *mustanbuth* dari suatu *ashal* yang *dhanni*, walaupun dari *ashal* yang *qath'i*, atau diistinbathkan dari *ashal* yang *qath'i*, tetapi penerapan kepada *furu'* adalah *dhanni*, maka hadis ahad didahulukan atas *qiyas*.³³

c. *Ijma'* Sahabat

Ijma' sahabat lebih diutamakan dalam penggalan hukum ternyata di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak disebutkan maka imam Hanafi lebih mendahulukan *ijma'* Sahabat dari pada pendapat pribadinya atau pendapat murid-muridnya.

d. Aqwalush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka

³²Moenawar Cholil, *Empat Biografi Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.

³³Dedi Supriyadi, *Op. Cit*, h. 161-162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadis Nabi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat kepada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk *ijma'* dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Lebih dari itu, bahwa perkataan sahabat juga bisa dijadikan perkataan Nabi, tetapi mereka tidak akan melakukan dalam keadaan keragu-raguan, sehingga nantinya akan terjebak dalam kedustaan,³⁴ jika kita tetap dalam lagi ketetapan pendapat sahabat terbagi menjadi dua yaitu ada yang berupa *ijma'* dan ada yang bersifat fatwa, perbedaannya adalah *ijma'* bersifat mengikat dan fatwa tidak mengikat.³⁵

e. Al-Qiyās

Abu Hanifah berpegang kepada *Qiyās*, apabila ternyata dalam al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan '*illat* yang sama antara keduanya. Yang menjadi pegangan dalam menjalankan *qiyas* adalah segala hukum

³⁴ Abu Zahra, *Tarikhal-Madzahib al-Islamiyah*, (Kairo: Dār a-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 137.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Wasith fi ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Kutub, 1978),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara', ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian-pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemaslahatan, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, atau yang dibolehkan ataupun yang dimakruhkan. Semuanya demi kemaslahatan umat.

Walaupun demikian, tidak berarti semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma', boleh diqiyaskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyaskan suatu permasalahan kepada hukum lama, diantara rukun yang harus dipenuhi dalam *qiyas* adalah:

- a) *Ashal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-Ashlu* atau *al-Maqisalah* atau *al-Musyabbah bih*
- b) Cabang (*al-Furu'*), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-Far'u al-Maqis* atau *al-Musyabbah*.
- c) *Hukum ashal*, yaitu hukum syara' yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang.
- d) *Illat Hukum*, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munassab* dengan ada dan tidak adanya hukum dan *illat* inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan *qiyas*.³⁶

³⁶Nazar Bakri, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Rajawali Press, 1993), h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Al-Istihsān*

Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari *qiyās*. Penggunaan *ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi. *Istihsan* menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut istilah ulama Ushul Fiqh, *Istihsan* ialah meninggalkan ketentuan *qiyās* yang jelas *'illatnya* untuk mengamalkan *qiyās* yang samar *'illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.³⁷

g. *'Urf* (tradisi)

'Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Contoh *'urf* ialah kebiasaan dalam perkataan, yaitu perkataan “Walad” yang biasa diartikan untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan ijab kabul.³⁸

Tradisi lokal (*'urf*) menurut imam Hanafi termasuk salah satu sumber hukum, sepanjang tradisi tersebut tidak berbeda dan bersebrangan dengan prinsi-prinsip hukum Islam.³⁹

Imam Hanafi selain menggunakan sumber-sumber hukum di atas, beliau juga merumuskan kaidah-kaidah hukum, antara lain:⁴⁰

³⁷*Ibid.*, h. 189-190.

³⁸*Ibid.*, h. 193-194.

³⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 189.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pendapat seorang sahabat apabila berbeda dengan dalil umum, maka pendapat tersebut merupakan sebuah pengkhususan (*takhsīs*) dari dalil tersebut.
- b) Banyaknya orang yang meriwayatkan hadis bukan berarti hadis tersebut unggul (*rajih*).
- c) Tidak boleh mengambil kesimpulan hukum dari syarat atau sifat yang ada dalam sebuah teks dalil.
- d) Tidak boleh menerima hadis dengan seseorang perawi (*hadis ahad*) yang memuat larangan atau keharusan tertentu, sedangkan situasi dan kondisi realitas memaksa untuk melanggarnya (*'ummu al-Balwa*).
- e) Penunjukan makna perintah yang mengisyaratkan kepada wajib secara pasti diambil jika ada faktor lain yang memalingkannya.
- f) Jika perawi hukum adalah orang yang *faqih*, namun perilakunya berbeda dengan apa yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan riwayat yang disampaikannya.
- g) Mendahulukan *qiyās jalī* dari pada *khavar ahad* yang bertentangan dengannya.

Boleh mengambil hukum melalui *istihsan* dan meninggalkan *qiyās* jika situasi mendesak untuk melakukannya.

⁴⁰Muhammad Musthafa Salabi, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Beirut-Libanon: Dār an-Nahdlah

Arabiah, 1978), h. 314.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode Abu Hanifah adalah:

- a) Abu Hanifah menggunakan *qiyas* atau *istihsan* yang tidak ada nash. Abu Hanifah hanya mengambil yang lebih tepat diantaranya *qiyas* dan *istihsan*.
- b) Apabila tidak ada *qiyas* atau *istihsan*, Abu Hanifah mengambil '*urf*', apabila tidak ada nash al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* dan *istihsan*, baik *istihsan qiyasi* maupun *istihsan istisna'i* (*atsar, istihsan, ijma'* dan *istihsan darurat*)
- b. Pemikiran Sekunder

Dalam ini Abu Hanifah berpijak pada:

- 1) Bahwa dalam '*amm* adalah *qath'i*
- 2) Pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus
- 3) Banyaknya yang meriwayatkan bukan berarti yang lebih kuat
- 4) Adanya penolakan *mafhum* syarat dan sifat
- 5) Berpegang pada perbuatan rawi, bukan riwayatnya, jika perbuatannya menyalahi riwayatnya.
- 6) Mendahulukan *qiyas* atas hadis ahad yang dipertentangkan
- 7) Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *qiyas* jika diperlukan.⁴¹

⁴¹Jaih Mubaraq, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. Ke-III, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pandangan Abu Hanifah tentang Wali *Mujbir* dalam Perkawinan

Dari sejumlah pandangan ulama *madzhab* dalam hukum Islam tentang wali nikah, dapat dikatakan bahwa pendapat ulama Hanafiyah lebih mendekati kepada konsep masyarakat *bilateral* dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, pandangan tersebut dapat digambarkan berikut.

Dalam kitab *المبسوط* ditulis menurut Abu Hanifah (80-150/696-767), pendiri *madzhab* Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja jika tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak *اعتراض*).

Menurut Imam Abu Hanifah, pernikahan tanpa wali atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, *sekufu* atau tidak adalah boleh. Hanya saja apabila tidak *sekufu* maka wali berhak untuk membatalkannya. Dasar yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam membolehkan perkawinan tanpa wali adalah terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Q.S. al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴³

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya,

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah: 240)
 QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁴⁴

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 230)

QS. al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنٌ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
 تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁴⁵

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 232)

⁴⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h

⁴⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posisi wali dalam *madzhab* Hanafi itu tidak mutlak, dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang gadis (belum dewasa), menurut *madzhab* Hanafi, wanita yang telah *baligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, walinya boleh menentangnya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh diminta untuk membatalkan akadnya apabila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Madzhab Hanafi membagi wanita dalam hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan, dan bagi gadis pun kedudukan wali hanya dimintai izinya. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis, oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia sudah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (*wilayah*) termasuk mengawinkan dirinya.

Sedangkan dalil Sunnah Nabi yang mewajibkan berunding dan meminta izin kepada anak wanita yang hendak menikah diantaranya adalah:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya terlebih dahulu. Para sahabat bertanya, bagaimanakah izin (persetujuannya) itu?, Beliau menjawab, jika ia diam saja (tidak menyatakan penolakan). (HR. Bukhari)⁴⁶

Sedangkan dalil sunnah yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali ada empat *pertama* hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْأَيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁷

Artinya: “Telah bercerita pada kami Abdullah bin Fadhl dari Nafi’ bin dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan dimintai izinnya dan diam adalah tanda izinnya”. (H.R. Muslim)

Penyebutan *الاييم* Dalam hadis tersebut adalah wanita yang tidak mempunyai suami, baik gadis atau janda. *Kedua* hadis yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ إِذَا نَهَا سَكُوتُهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي لَفْظٍ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحِّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bersabda: Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Dan gadis diminta izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh muslim. (H.R. Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ibnu Hibban)

Ketiga hadis yang menerangkan tentang kasus yang menimpa khunsa, yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya.

جَاءَتْ إِلَى ابْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَنْ ابْنِي زَوَّجْتَنِي مِنْ ابْنِ أَخِيهِ وَأَنَا لَدَاكَ كَارِهَةٌ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيِزِي مَا صَنَعَ أَبُوكَ فَقَالَتْ مَا لِي رُغْنَةٌ فِيمَا صَنَعَ ابْنِي فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبِي فَلَا نِكَاحَ لَكَ أَنْكَحِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَتْ أَجِزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي

⁴⁶ Bab لا ينكح الاب وغير البكر والثيب الا برضاها 5136 Hadis Nomor

⁴⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Tayyibah, 2006), h. 641.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْأَبَاءِ مِنْ أُمُورِ بَنَاتِهِمْ شَيْءٌ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهَا رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتِهَا وَلَمْ يُسْتَفْسَرْ إِهْمًا بِكَرٍّ أَوْ تَيْبٍ

Dan *keempat*, kasus Ummu Salamah ketika dilamar oleh Rasulullah tidak ada wali yang hadir sehingga posisi wali digantikan oleh Umar atas perintah Rasulullah.

Menurut Abu Hanifah, pernyataan diatas, berkaitan dengan peran wali dan persetujuan wanita dalam perkawinan, menurut beliau, persetujuan wanita, baik gadis atau janda harus ada di dalam perkawinan, apabila mereka menolak maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak. Terhadap hadis لا نكاح الا بولي, menurut Imam Abu Hanifah hanya berlaku bagi wanita yang belum memenuhi syarat *mukallaf* sebagai subyek hukum, belum baligh.

Dasar penetapan harus ada persetujuan gadis dalam perkawinan, ada dua. *Pertama*, kasus dimasa Nabi, yang menyatakan bahwa Nabi menolak menikahkan seorang gadis.

Perwalian *ijbār* menurut Imam Hanafi adalah:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَايَةُ إِجْبَارٍ هُوَ الْوَلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بِكَرٍّ كَانَتْ أَوْ تَيِّبًا وَكَذَلِكَ الْكَبِيرَةُ
 الْمُعْتَوَةِ وَالْمَرْقُوقَةُ⁴⁸

Artinya: Imam Abu Hanifah berkata: “perwalian *ijbar* ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak prempuan.

Dari pendapat di atas tersebut dapat dipahami bahwa perwalian *mujbir* atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa

⁴⁸Kamaluddin Muhammadas-Sarkandari, *Syarah Fath al- Qadir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Imiyah, 1995), h. 720.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tidak cakap hukum seperti idiot. Syeikh Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat Hanafiyah mengenai wali *mujbir* sebagai berikut:

الْحَنِيفَةُ قَالُوا لَا وَلِيَّ إِلَّا مُجْبِرٌ فَمَعْنَى الْوَلَايَةِ تَنْفِيدُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ سَوَاءً رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ عَنْدهُمْ وَلِيٌّ غَيْرُ مُجْبِرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَيَخْتَصُّ الْوَلِيُّ الْمَجْبِرُ بِأَجْبَارِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةُ مُطْلَقًا وَالْمَجْنُونَةُ الْكَبِيرُ⁴⁹

Artinya: Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali *mujbir*, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali *mujbir* yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali *mujbir* untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak. Laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”

Dalam kitab berbeda Wali *mujbir* menurut *madzhab* Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.⁵⁰

Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada perwalian kecuali wali *mujbir*.

Karena menurutnya seorang wanita yang telah dewasa ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana pendapatnya:

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بَحْوَزُ مُبَاشِرَةُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةُ عَقْدٌ نِكَاحُهَا

Artinya: Seorang wanita yang telah dewasa (*baligh*) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian kepada perempuan yang merdeka, berakal, dan telah *baligh* baik perawan atau janda kedudukannya adalah *sunnah* untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'arba'ah*, (Mesir: t.p., 1969), h. 720.

⁵⁰ Fakhrol al-Din Usman Bin Ali, *Tabyinu al-Haqaiq*, Juz II, (Beirut-Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), 493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya.

Dalam kutipan Imam Abu Hanifah:

لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ⁵¹

Artinya: Tidak dibolehkan untuk wali mujbir melarang kepada wanita yang telah dewasa terhadap pernikahannya.

Dari beberapa pernyataan kutipan pendapat Imam Abu Hanifah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali *mujbir* menurutnya ialah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun ghairu ‘aqil baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan. Dalam riwayat lain perwalian *ijbār* juga terhadap laki-aki yang masih kecil dan gila. ‘Illat dari pendapat adalah ghairu ‘aqil. Menurut Imam Abu Hanifah hak *ijbār* tersebut dimiliki oleh bapak, kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan ‘*ashabah*.

Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karenanya, menurut *Madzhab* Hanafi seorang wali yang merupakan bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan perempuan, atau orang idiot laki-laki dan perempuan, baik masih kecil atau sudah besar, perawan maupun janda.⁵² Sebab disyariatkan perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang gila adalah perwalian yang bersifat keharusan. Perwalian ini merupakan perlindungan terhadap kepentingan orang yang dinikahkan, serta untuk menjaga hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahannya.

⁵¹Kamaluddin Muhammad as-Sakandari,, *Op. Cit*, h. 246.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 173.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang penetapan tidak wajibnya wali *mujbir* dalam perkawinan bagi gadis dan janda (*baligh*), adalah menggunakan dalil al-Quran dengan pendekatan *bil-ra'yi* atau analogi kemudian *sunnah* dengan pendekatan *bil ma'tsur* yaitu penjelasan hadis dengan hadis, dalam hal kebolehan gadis dan janda (*baligh*) untuk melakukan akad pernikahan walaupun tanpa dihadiri wali. Dari al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah 240, 230, 232) *maqasid* akad di dalam ayat-ayat ini ditujukan kepada (*hunna*) yaitu akad di dalam pernikahan yang berhak adalah perempuan tersebut.
2. Jika ditinjau dari konsep *Maqasid al-Syari'ah* pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wali *Mujbir*/ hak *ijbar* hanya dimiliki oleh perempuan yang belum *baligh*, tidak waras dan mempunyai keterbelakangan mental (*idiot*) karena wanita yang belum *baligh* tindakannya belum cakap hukum, maka hal ini kedudukan wali digolongkan kepada tujuan *Dharuriyyat* wajib ada demi kemaslahatan orang yang ada dibawah perwaliannya. Namun jika perempuan tersebut sudah *baligh* kedudukan wali hanya sebagai penyempurna atau disebut dengan *Hajiyyat*, karena menurut Imam Abu Hanifah wali bagi perempuan yang sudah *baligh* tidak sebagai salah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu rukun yang wajib ada dalam pernikahan namun hanya sebatas penyempurna atau sunnah, akan tetapi harus ada terlebih dahulu persetujuan dari seorang wali.

B. Saran

Berlandaskan pada kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-sarannya terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Keilmuan

Supaya dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait perwalian, sehingga dapat lebih difahami dalam prakteknya dimasyarakat.

2. Masyarakat

Agar dapat lebih memahami tentang wali *mujbir* dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ajaran agama dan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Bagi seorang bapak dapat menempatkan kedudukannya kapan seharusnya mengambil hak kedudukan sebagai wali *mujbir*, dan perempuan anak dari bapak tersebut sanggup memposisikan dirinya kapan dan dalam keadaan seperti apa dapat menanggukkan pernikahan kepada wali *mujbir* (bapak atau kakek) serta keadaan seperti bagaimana ia dapat menikahkan dirinya sendiri, sehingga tidak memberikan kesan pernikahan yang dipaksakan, karena pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk membina keluarga yang kekal dan abadi.



3. Lembaga

Supaya mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pernikahan baik wali, calon mempelai suami dan calon mempelai perempuan agar lebih memahami bagaimana sistem atau proses pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku, terutama berkaitan kedudukan seorang wali dalam hal ini wali *mujbir*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 1999
- Abidin, Zainal dan Mas'ud Ibnu. *Fiqh Madzhab Syāfi'i*, (Edisi engkap) Buku 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Ahmad bin Salamah, Syihabuddin. *al-Qulyūbi 'Umairah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003
- Ali, bin Usman, al-Dīn Fakhru. *Tabyinu a-Haqāiq*, Juz II, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t,t
- Al-Ashari, Su'udi. "Perspektif Kiai Krpyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah", Yogyakarta: UIN Sunan Kaijaga, 2010
- Al-'Aini, Mahmūd bin Muhammad, Muhammad Abī. *al-Bināyati fī Syarh al-Hidāyati*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- Al-Bājuri, Ibrāhīm Muhammad. *Hasyiah al-Bājūri*, Beirut: Dār al-Ilmiah, 1999
- Al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina*, Beirut: Dār al-Fikr, t,t
- Al-Dimyati, Shatā Muhammad. *Hāshiyah i'anatu al-Talibīn*, Juz III, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2009
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahibi Ar-Ba'ah*, Juz IV, Mesir: t.p., 1969
- Al-Naishaburi, al-Qushairi Hajjaj, bin Muslim Husaini Abi. *Shāhih Muslim*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2013
- Al-Nawawī, Al-Imam. *Majmū' Syarah al-Muhadhab*, Jilid XVI, Kairo: Dār al-Hadith, 2010
- Al-Syarkhasi, Syamsuddin. *al-Mabsūth*, Juz, V, Beirut: Dār al-Ma'rifah., t,t
- Al-Syaukany, 'Ali Muhammad. *Irsyad a-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*, Juz I, Riyadh: Dār al-Fadhiyah, 2000
- Al-Ustaimin, M. Shaleh, Dawud, A. Aziz Ibn Muhammad. *Pernikahan Islami*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz, VI, Beirut: Dār al-Fikr 1409 H/1989 M
- Taghyir al-Ijtihad*, Beirut: Dār al-Makataby, 2000
- al-Wasith fi ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dār al-Kutub, 1978
- Ambary, Muarif Hasan. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005
- Aminuddin, dan Abidin Slamet. *Fiqh Munakaht I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i al-Sughra*, Riyad: Dar al-Islam, tt
- As-Saakandari, Muhammad Kamaluddin. *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1995
- Asy-Shidieqi, Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Cet. Ke-I, semarang: PT. Pustaka Karya Putra, 1997
- Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Arifin, Fauzi M. *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Madzhab Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2001
- 'Abidin, Ibn Amīn Muhammad. *Raddul al-Mukhtār 'Ala al-Dar al-Mukhtār*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- Bakri, Nazar. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Bandung: Rajawali Press, 1993
- Bak, Hudhari. *Terjemah Tarikh al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)* t.t: Darul Ikhyia Indonesia, 1980
- Bisri, Hasan Cik. *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Kencana, 2003
- Cholil, Moenawar. *Empat Biografi Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Daruqutni, Umar bin Ali. *Sunan Dāruquthni*, Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Djalil, Abd. Maman. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007
- Drajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih*, Jilid 3, Jakarta: Depag RI, 1985
- Ghazali, Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghozali, Rohman Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hasan, Ali M. *Perbandingan Madzhab*, cet. III Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Himami, Ibn Abdurrahman bin, Muhammad al-Dīn Kamāl. *Syarh Fathul al-Qadīr*, Juz III, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Ibn Musa, Ibrahim, Al-Syātiby. *Al-Muwafaqāt fī Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Ibrahim, Husen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Itruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademik Presindo, 2000
- Laily, Mansur. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syāfi'i*, Malang: Malang Press, 2009
- Mahmasni, Subhi. *Filsafat Tasyri Fil Islam*, alih bahasa, Ahmad Sudjono, Cet. Ke-I, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Riyad: Dārussalām, 2008
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mansur, Ibn. *Lisan al-Arabi*, Jilid VIII, Beirut: Dār al-Sadr, t.t
- Mas'ud, Husein Muhammad. *Al-Tahdzib Fi Fiqh al-Imam asy-Syāfi'i*, Juz V, Beirut-Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010
- Mas'ud, Ibn Abi, 'Alauddin. *Badāi'u al-Shāna'i*, Juz II, Damasqus: Dār al-Fikr, t.t
- Ma'ruf, Inis. *Munjid*, Beirut: Dār al-Musyrik, tt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Munawir, Warson Ahmad. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: 1987
- Moloeng, J. Lexi. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Osdakarya, 2002
- Mubaraq, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. Ke-III, Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Mun'im, Abdul, Abdurrahman Mahmud. *Mu'jam al-Mushthaahat wa al-Fadz al-Fiqhiyyah*, Juz III, Kairo: Dār al-Fadhilah, 1401/1981 M
- Nasiri, *Praktek Prostitusi Ala Yusuf Qardawi Tinjauan Hukum Islam Fatwa Kawin Misyar*, Cet. Ke-3, Surabaya: Khalista, 2010
- Perpustakaan Nasional RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet, Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1996
- Praja, S. Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980
- *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, Bandung: Pustaka Mizan, 2003
- Rahman, Fazlur. *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994
- Ramulyo, Idris M. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Rosadah, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Rasyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988
- SA, Ramli. *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, Cet. Ke-I, Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- Sabrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Salabi, Musthafa Muhammad. *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Beirut-Libanon: Dār an-Nahdlah al-‘Arabiah, 1978
- Saleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzûl*, Bandung: CV. Diponegoro, 1987
- Saryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Syata, Muhammad Bakar Abu. *Hasyiah I’ānat al-Thālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub, 1999
- Shihab, Quraish M. *al-Qur’an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 20110
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sulaiman, Dāwud Abī. *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Dārussalām, 2008
- Suma, Amin Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Suryadilaga, dkk Alfatih M. *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Saikh, dkk., *Perbandingan Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Madzhab*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009
- Tim Citra Umbara, *UU NO 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2009
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam
- Umar, Ibn Muhammad bin Sulaiman. *Hashiyah Bujairamī*, Juz III, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2004
- Umar, Ibn Ali. *Sunan al-Dāruquthnī*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Aresalah Publisher, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

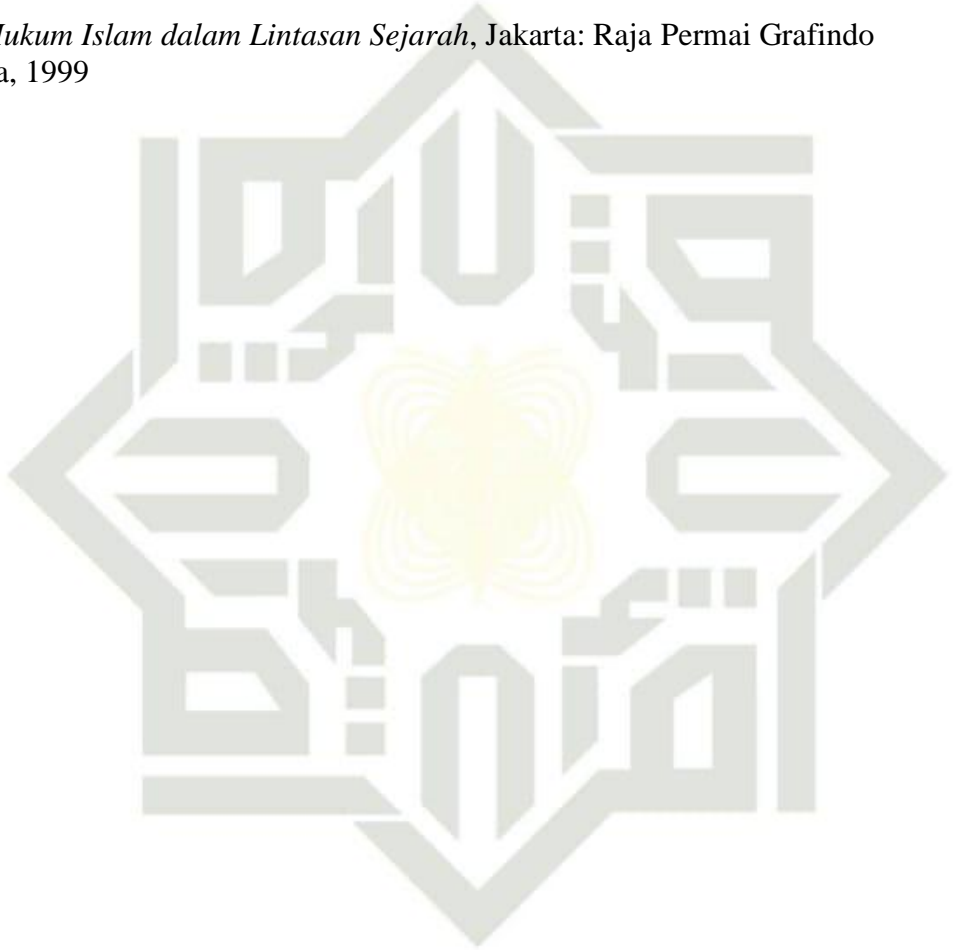
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yanus, M. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Madzhab*, Jakarta: Hindakarya Agung, 1999

Zahra, Abu. *Tarikhal-Madzahib al-Islamiyah*, Kairo: Dār a-Fikr al-Arabi, t.t.

Zein, Ma'shum Muhammad. *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Isinbath Para Fuqaha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1999



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Harliza, S.HI
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Lajau, 14-07-1986
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah : Jln. Pramuka, RT 001/ RW 002, Kel. Lembah Sari,
Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru-Riau (28262)
No. Tlpn/Hp : 082172992225
Nama Orang Tua : Bapak/ H.Bahrudin
: Ibu/ Hj. Ermina
Nama Suami : Agusman Saputra, S. HI
Nama Anak : 1. Zubair Manhalul Khair
: 2. Naufal Abqary

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI al-Rasyid Tanjung Lajau Th Lulus 1999
MTs.N Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Th Lulus 2002
MAN Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Th Lulus 2005
(S.1) IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012

KARYA ILMIAH

**Studi Analisis Terhadap Peran KUA Dalam Upaya Pencegahan
Perkawinan (Kajian Perundang-Undangan)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : HARLIZA
NIM : 21090225359
PROGRAM : PASCA SARJANA
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI :

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KETERANGAN |
|----|-----------------|---|------------------|----------------|
| 1 | Rabu 27/03 2019 | Peran Momar dalam Menentukan harta warisan pesera tinggi di lingkungan Kamang Musiak Kecamatan Kamang Magoek Kabupaten Agam | 2 | Pusa Ma |
| 2 | Rabu 27/03 2019 | Indak Wanita Kari yang di tinggal mati oleh suami di tinjau dalam perspektif Hukum Islam dan Magazid syaria | 2 | Endik wa Aruan |
| 3 | Rabu 27/03 2019 | Penetapan Nasab dari hubungan Biologis di luar Nisab dalam perspektif Fiqh Islam | 2 | Osar Mahlo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pekanbaru, 27 Maret, 2019
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
NIM
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

HARTIZA
: 21090225359
: PASCA SARJANA
: Hukum Keluarga

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KETERANGAN |
|----|----------------------|--|------------------|------------|
| | Jum'at 16/05 2019 | 1. Loh Wanita Khuluk Dalam Pasal 155 KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah | | |
| | " | Tinjauan Maqashid Syariah tentang adanya ahli waris pengganti | | |
| | | Nafkah Biaya Penghasilan Istri Menurut Imam Nawawi dan AL-Syutuni | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pekanbaru, 10 Mei 2019
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ARLIZA
NIM : 21890225359
PROGRAM : PASCA SARJANA
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI :

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|------------------|------------|
| | Jum'at 2019 10/05 | Study Kualitas Saran Dan Materi HADIST PADA FITRI AL-KAHQA AL-MATRI KARYA SYAFI HUNARDI | | |
| | " | Analisis Ayat-Ayat AL-Ukuran Tentang Prestasi. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pekanbaru, 10 Mei 2019
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : HARLIZA
NIM : 2190225309
PROGRAM : PASCA SARJANA
PRODI : Hukum KELUARGA
KONSENTRASI :

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KETERANGAN |
|----|---------------------|--|------------------|-------------------------|
| 1. | Senin 24/06 2019 | Lafadz Nikah Menurut Imam Syafi'i Perpektif Maqshid al-Syariah | | Ali Mustopa |
| | | Kader Nafkah Menurut Keluarga Menurut Imam Qudamah | | Finta Fajar Fadillah |
| | | Pewenangan Wali dalam Menentukan Pernikahan Sunda yang belum dewasa Menurut Imam Syafi'i | | Rahmat Aripin |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pekanbaru, 24 Juni 2019
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

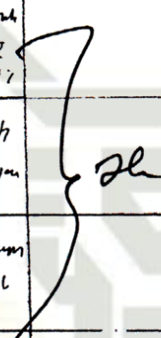
UIN SUSKA RIAU



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
NIM
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

HARIZA
21890225359
PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA

| NO | TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|---|--------------|
| | 19/11/2019 Sabtu | Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan Pornografi pada pasal 15 Undang-undang Norma 44 tahun 2008 Tentang Pornografi Di Tinjau Menurut Hukum Islam |  | Sholihul Juh |
| | 19/11/2019 Sabtu | Huban. Wanita yang di hinggai oleh geloq Suami pasal 170 KHI di tinjau Menurut Ma'ysunul Al-hayiah | | Edi Mursyid |
| | 19/11/2019 Sabtu | Biaya pernikahan Umi Menurut hukum Islam Analisis pendapat Imam al Nawawi dan al-sya'rani | | Alr Lubis |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pekanbaru, 19 November 2019
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Harliza
ID Number : 21890225359
Date of Birth : July 14, 1986
Sex : Female
Test Form : Paper Based Test
Achieved the following scores on the
English Proficiency Test
Listening Comprehension : 45
Structure & Written Expressions : 48
Reading Comprehension : 53
Overall Score : 487

Expire Date : July 05, 2020

The Head of Language Development Center

Drs. H. Kelayo Hasibuan, M. Ed- TESOL
NIP. 19651028199703100



English Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مرکز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST
DIBERIKAN KEPADA
Harliza

Nomor ID : 21890223359
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 14 Juli 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

| | |
|----------|-------|
| الاستماع | 51 : |
| القرأة | 50 : |
| القواعد | 46 : |
| النتيجة | 490 : |

Berlaku Hingga : 09 Mei 2020



PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UIN
RIAU
SULTAN SYARIF KASIM

The Head of Language Development Center



Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed- TESOL
NIP.196510281997031001

Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

| NO. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing / Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | | Pertemuan Proposal | <i>[Signature]</i> | |
| 2. | | Pertemuan BAB I | <i>[Signature]</i> | |
| 3. | | Pertemuan Bab II | <i>[Signature]</i> | |
| 4. | | Pertemuan Bab III dan IV | <i>[Signature]</i> | |
| 5. | | Pertemuan Bab V dan Penutup | <i>[Signature]</i> | |
| 6. | | | <i>[Signature]</i> | |

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21 - 11 - 2017
Pembimbing I / Promotor
[Signature]

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

| NO. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing / Co Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|--|--------------------------------|------------|
| 1. | | Konsultasi Proposal dan disetujui | <i>[Signature]</i> | |
| 2. | | Rumusan Masalah Proposal | <i>[Signature]</i> | |
| 3. | | Menyusun Rumusan Masalah - Latar belakang masalah - Rumusan Masalah - Catatan kaki | <i>[Signature]</i> | |
| 4. | | Isi Tesis - Pendapat Abu Hanifah dan dari buku analisis masalah at-suniah | <i>[Signature]</i> | |
| 5. | | Pemilihan kata-kata dan pengubahan kata-kata lain | <i>[Signature]</i> | |
| 6. | | | <i>[Signature]</i> | |

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21 - 11 - 2017
Pembimbing II / Co Promotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU :

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com

DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

NAMA : HARLIZA
NIM : 21630225359
PROGRAM STUDI : PASCA SARJANA (S2)
JUDUL TESIS : Wati Mujib Dalam Pertawinan bagi Satis
dan Janda (Baugh) Menurut Pemikiran Abu
Hamidah (Analisis maqashid al-Syar'iah)

| NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | | KETERANGAN |
|------------------------------|--------------------|-------|-------|------------|
| | | ANGKA | HURUF | |
| 1 | METODE | 81 | | |
| 2 | MATERI | 83 | | |
| 3 | SUMBER | 82 | | |
| 4 | BAHASA | 82 | | |
| | TOTAL | | | |
| NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4 | | 82 | A- | |

PEKANBARU, _____ 2019

| NILAI ANGKA | NILAI HURUF | ANGKA MUTU |
|----------------|----------------|---------------|
| 85 ≥ | A | 4.00 |
| 80 – 84 | A- | 3,7 |
| 75 – 79 | B+ | 3.3 |
| 70 – 74 | B | 3.0 |
| 65 – 69 | B- | 2.7 |
| 60 – 64 | C+ | 2.3 |
| 55 – 59 | C | 2.0 |
| 50 – 54 | D | 1.0 |
| ≤ 50 | E | 0.0 |

[Signature]
Prof. H. Zaki Darsani, M.A.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU :

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX.1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com


DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

NAMA : HARLIZA
NIM : 2107023551
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga
JUDUL TESIS : Wali Mufar Dalam Perkawinan Bagi Etnis dan Janela (Baligh) Menurut Pemikiran Abu Hanifah (Analisis Maqashid al-Syar'iah)

| NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | | KETERANGAN |
|------------------------------|--------------------|-------|-------|------------|
| | | ANGKA | HURUF | |
| 1 | METODE | 82 | A- | |
| 2 | MATERI | 88 | A- | |
| 3 | SUMBER | 84 | A- | |
| 4 | BAHASA | 80 | A- | |
| | TOTAL | 334 | | |
| NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4 | | 83,5 | A | |

PEKANBARU, 21 ~ 11 2019

| NILAI ANGKA | NILAI HURUF | ANGKA MUTU |
|-------------|-------------|------------|
| 85 ≥ | A | 4.00 |
| 80 - 84 | A- | 3,7 |
| 75 - 79 | B+ | 3.3 |
| 70 - 74 | B | 3.0 |
| 65 - 69 | B- | 2.7 |
| 60 - 64 | C+ | 2.3 |
| 55 - 59 | C | 2.0 |
| 50 - 54 | D | 1.0 |
| ≤ 50 | E | 0.0 |


Dr. Hajar, M.A.

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| TGL/HARI | JUDUL TESIS/DISERTASI | PARAF SEKRETARIS | KETERANGAN |
|------------|--|------------------|--------------|
| 06/11 2018 | Kewenangan Wali dalam Menentukan Pernikahan Landa di bawah umur Menurut Imam Syafi'i | | Rahma Arifin |
| | Saksi yang adii dalam pernikahan Menurut Imam as-syafi'i di hujung Lari Magaskid syariah | | Marlis |
| | Kupur Jukud dalam Pandangan Isf sir (tolah foto kupur jukud) dalam kitab bepr al-munir Dr. Wahbah zuhali | | Hormas |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Pekanbaru, 6, November 2018
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar